

**STRATEGI JEPANG DALAM MEMPERTAHANKAN NEGOSIASI  
PERJANJIAN KERJASAMA *COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE*  
*AGREEMENT FOR TRANS PACIFIC PARTNERSHIP* TAHUN 2017 – 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**MUHAMMAD NUR AZIZ**

**14323022**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**STRATEGI JEPANG DALAM MEMPERTAHANKAN NEGOSIASI  
PERJANJIAN KERJASAMA *COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE*  
*AGREEMENT FOR TRANS PACIFIC PARTNERSHIP* TAHUN 2017 – 2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat

Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

Juli 2019

23 JUL 2019

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S

Dewan Penguji

1. Enggar Furi Hardianto, S.IP., M.A.
2. Hangga Fathana, S.IP., B.Int., M.A.
3. Irawan Jati, S,IP., M.Hum., M.S.S

Tanda Tangan

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nur Aziz

No. Mahasiswa : 14323022

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Strategi Jepang dalam Mempertahankan Negosiasi Perjanjian Kerjasama *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* Tahun 2017-2018

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Juli 2019

Yang menyatakan



Muhammad Nur Aziz

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin,

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

### Bapak dan Ibu

Terimakasih atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat, perhatian, semangat, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga selama ini.

### Adik dan Kakak

Terimakasih atas semua doa, dukungan, kasih sayang dan nasehat.

### Semua Keluarga Besar

Terimakasih atas doa, nasehat, dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

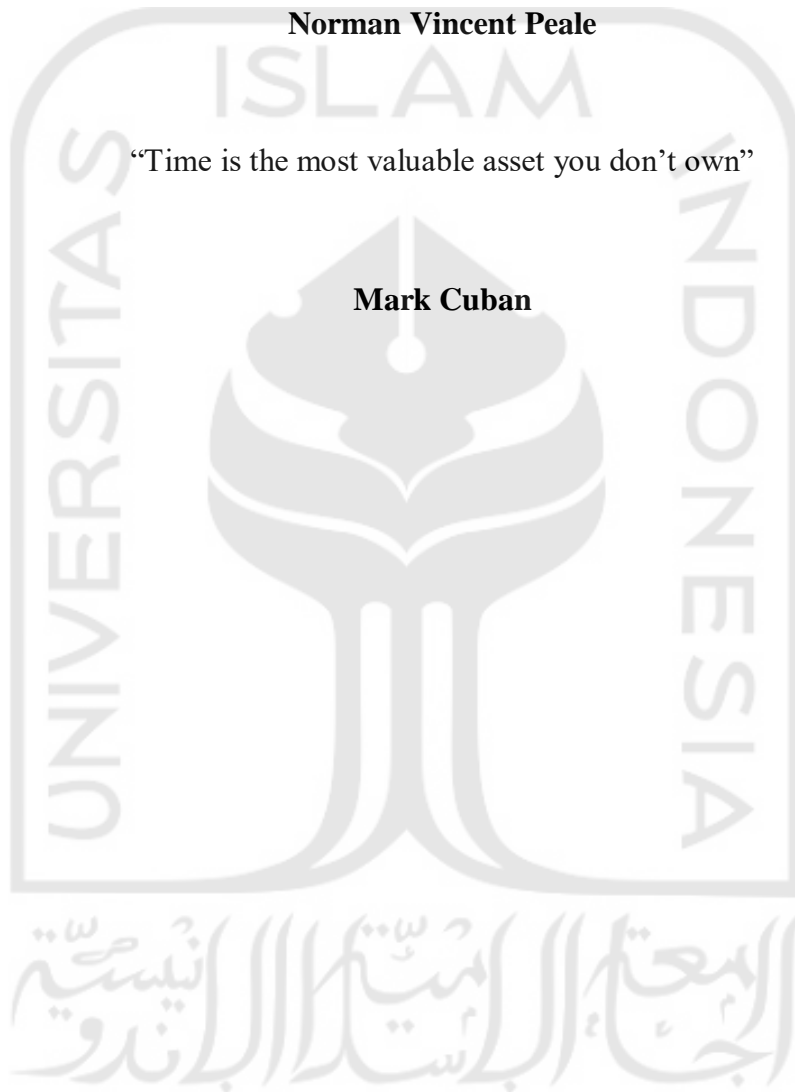
## HALAMAN MOTTO

“Ubah Pikiranmu dan kau akan mengubah duniamu”

**Norman Vincent Peale**

“Time is the most valuable asset you don't own”

**Mark Cuban**



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

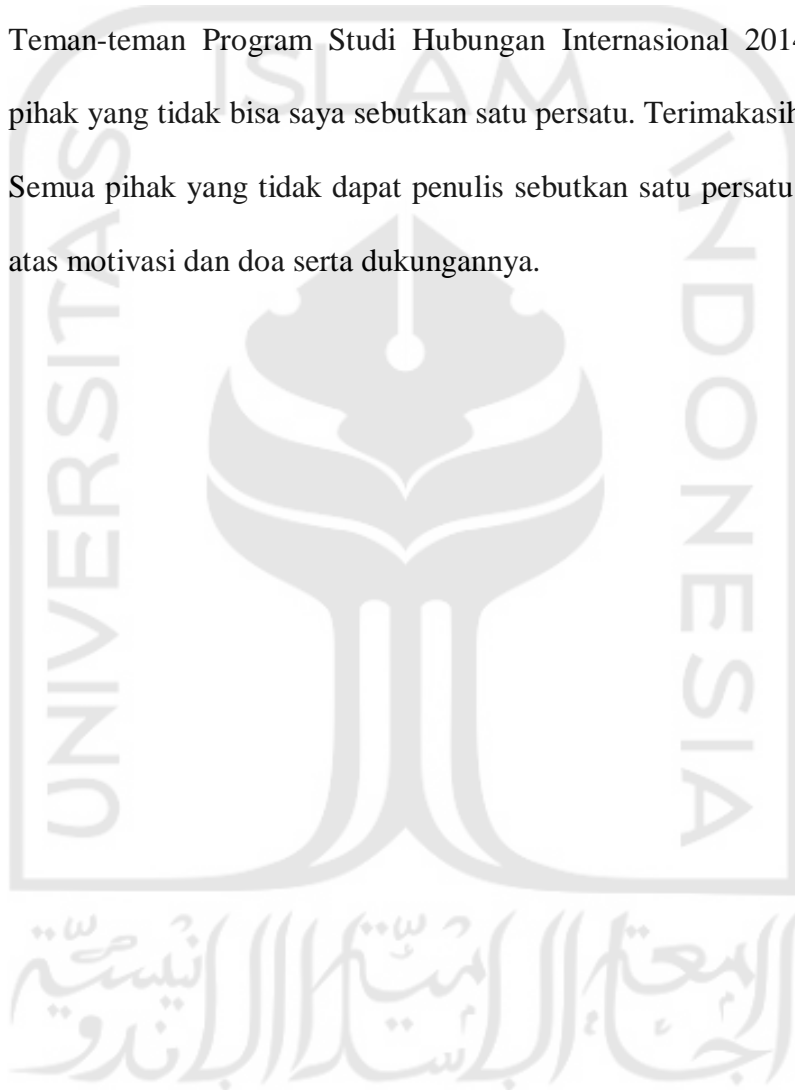
Segala puji dan syukur kepada Allah *Subhanallahu wa ta'alla* atas segala rahmat-Nya serta segala kekuatan dan kemudahan sehingga karya ini dapat terselesaikan. Kemudian, Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam menulis skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta dukungan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan inayahnya yang sangat melimpah serta tak terhingga kepada penulis sehingga sampai tahap ini.
2. Muhammad SAW, yang telah memberikan pertolongan kepada umatnya untuk selalu teguh di jalan Allah SWT.
3. Bapak dan Ibu yang menjadi alasan untuk selalu semangat dalam menjalankan hidup dan mendukung saya dalam berbagai hal agar penulis selalu maju.
4. Kakak-kakak ku yang tidak pernah menyerah memberikan motivasi agar selalu semangat dalam menempuh masa perkuliahan S1 hingga saat ini.
5. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

7. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan semangat dalam membimbing dan memberikan masukan, kritik yang bermanfaat terhadap saya dalam proses penulisan skripsi ini. Kemudian, saya mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan kebaikan yang lebih mulia dan senantiasa diberikan kesehatan serta umur yang panjang terhadap Bapak.
8. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Penguji Seminar Proposal dan Sidang Pendarasan yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. Terimakasih juga atas segala kritik yang membangun sehingga penulis lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang kepada Bapak.
9. Seluruh dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
10. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Terimakasih atas kemudahan dalam mengurus administrasi.
11. Irvan Suntoro, Sobat Terdekatku, Terimakasih selalu memberi dukungan, bantuan, dan waktu kepada penulis agar selalu tegap tanpa menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bintang Mupiza, Sahabatku, Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, bantuan dan waktu yang telah kalian luangkan.

13. M. Nursalim Hakim, sahabat yang selalu memberi dukungan, semangat dan waktu untuk diskusi. Terimakasih.
14. Sahabat-sahabatku terutama buat Firdaus Akbar, M. Ali Alvin, Diannisa H, Ghazian Luthfi Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, bantuan dan waktu yang telah kalian luangkan.
15. Teman-teman Program Studi Hubungan Internasional 2014 dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas motivasi dan doa serta dukungannya.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Signifikansi Penelitian .....	6
1.4 Cakupan Penelitian .....	6
1.5 Tinjauan Pustaka .....	7
1.6 Landasan Konseptual .....	12
1.7 Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II STRATEGI JEPANG DALAM MEMPERTAHANKAN NEGOSIASI CPTPP 2017-2018</b> .....	22
2.1 Perkembangan Negosiasi Perjanjian CPTPP .....	22
a. Trans-Pacific Partnership .....	22
2.2 TPP Paska Keluarnya Amerika Serikat : CPTPP .....	27
a. Respon Domestik Jepang Terhadap Keluarnya AS dari TPP .....	29
b. Peran Aktif Jepang Dalam Negosiasi CPTPP .....	31
c. Strategi Jepang Dalam Mempertahankan Negosiasi CPTPP .....	36
<b>BAB III ANALISIS <i>BUREAUCRATIC MODEL</i> DALAM KEPUTUSAN JEPANG MEMPERTAHANKAN NEGOSIASI CPTPP 2017-2018</b> .....	40
3.1 Identifikasi Model Birokratik .....	41
3.1.1 Pemain-Pemain Dalam Posisi .....	41
3.1.2 Prioritas, Persepsi dan Isu .....	47

3.1.3 Kepentingan, Pertaruhan dan Kekuatan.....	51
3.1.4 Masalah-masalah .....	55
3.1.5 Saluran Tindakan .....	57
3.1.6 Tindakan sebagai Politik .....	58
3.1.7 Hasil ( <i>Streams of Outcome</i> ) .....	59
3.2 Analisis Model Birokratik .....	60
3.2.1 Aksi dan Niatan .....	60
3.2.2 Posisi ( <i>Where you stand depend on where you sit</i> ) .....	62
3.2.3 <i>Chief, Indians</i> serta Kelompok Kepentingan .....	66
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	67
4.1 Kesimpulan .....	67
4.2 Saran dan Rekomendasi.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72




## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 2.1 Anggota <i>Trans-Pacific Partnership</i> .....	24
Tabel 2.2 Negosiasi-negosiasi TPP 2010-2015.....	25
Tabel 2.3 Negosiasi TPP Paska Keluarnya Amerika Serikat.....	36
Tabel 3.1 Pemain-Pemain <i>Chief</i> .....	44
Tabel 3.2 Pemain-pemain <i>Staffers</i> .....	44
Tabel 3.3 Pemain-pemain <i>Indians</i> .....	45
Tabel 3.4 Pemain-pemain Kelompok Kepentingan.....	45



## DAFTAR SINGKATAN



APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
AS	: Amerika Serikat
CDP	: Constitutional Democratic Party
CPTPP	: Comprehensive and Progressive Agreement Trans-Pacific Partnership
CRR	: Capital Recruitment Regulation
DP	: Democratic Party
FDI	: Foreign Direct Investment
G20	: Group of Twenty
GDP	: Gross Domestic Product
ICC	: Industry Competition Court
IPR	: Intellectual Property Rights
ISDS	: Investor State Dispute Settlement
JA	: Japan Agriculture
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LDP	: Liberty Democratic Party

MAFF : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

METI : Ministry of Economic, Trade, and Industry

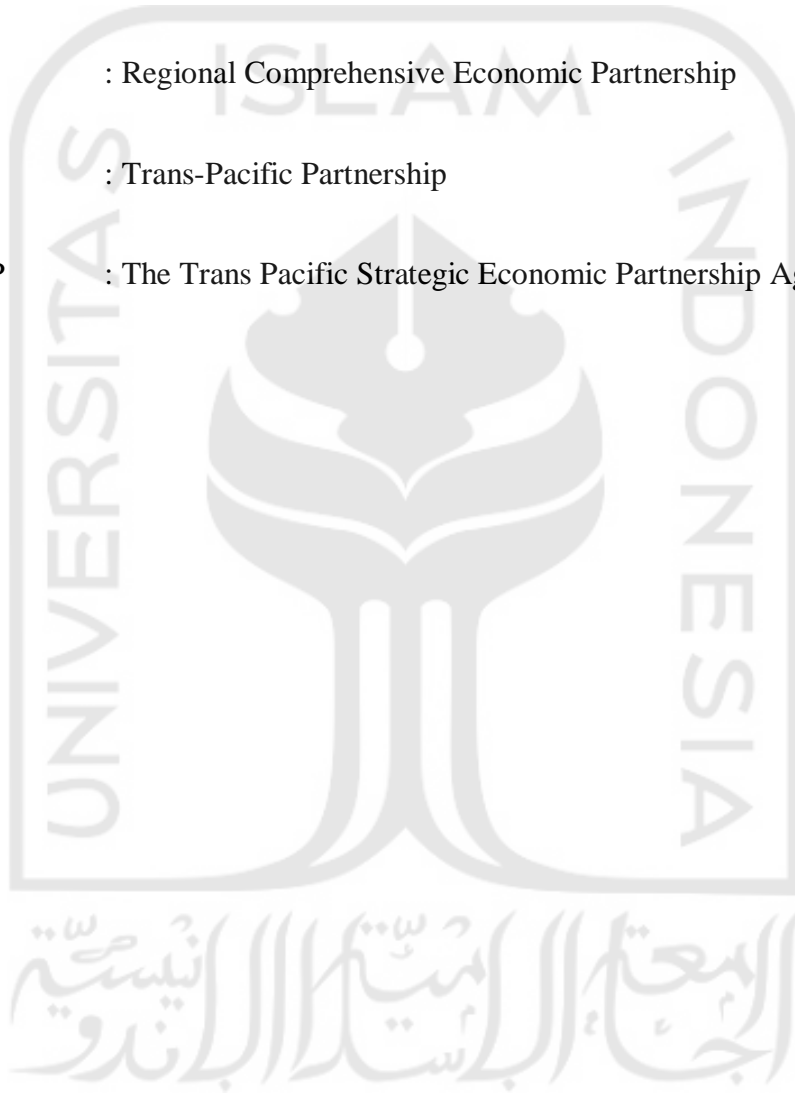
MOFA : Ministry of Foreign Affairs

PDB : Produk Domestik Bruto

RCEP : Regional Comprehensive Economic Partnership

TPP : Trans-Pacific Partnership

TPSEP : The Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement



## ABSTRAK

Pada tahun 2017, Amerika Serikat sebagai anggota dan mitra dagang terbesar dalam *Trans-Pacific Partnership* memutuskan untuk keluar dari kerjasama perdagangan bebas kawasan tersebut. Keluarnya Amerika Serikat dari *Trans-Pacific Partnership* berpengaruh besar pada kelangsungan perjanjian perdagangan tersebut mengingat sebagai perekonomian terbesar yang tergabung dalam organisasi. Meskipun demikian 11 anggota lain tetap bertahan dalam negosiasi dan menyetujui terciptanya *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*. Jepang sebagai perekonomian terbesar kedua dalam *Trans-Pacific Partnership* juga memutuskan untuk tetap bertahan. Tidak hanya mempertahankan negosiasi, Jepang juga lebih aktif dalam mendorong negosiasi yang berjalan dengan beberapa strategi. Dengan demikian penelitian ini melakukan analisis mengenai sikap bertahannya Jepang dalam negosiasi *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yang dicetuskan oleh Graham T. Allison yaitu *Bureaucratic Model*. Keputusan yang diambil oleh Jepang di analisis dengan dua komponen yang ada dalam pendekatan Model Birokratik yaitu 7 Identifikasi model birokratik dan Analisis Model Birokratik.

**Keywords :** *TPP, Jepang, CPTPP, Politik Perdagangan Internasional*

## ABSTRACT

In 2017, the United States as the largest member and trading partner in the *Trans-Pacific Partnership* decided to exit the Asia Pacific's regional free trade cooperation. The withdrawal of the United States from the *Trans-Pacific Partnership* has impact on the continuity of the trade agreement given that it is the largest's member economy incorporated in the organization. Despite the United States' withdrawal, 11 other members remained in negotiation and agreed to create a *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*. Japan as the second largest economy in the *Trans-Pacific Partnership* decided to stay. Japan is not only maintaining on negotiation but, Japan is also more active in encouraging ongoing negotiations with several strategies. Thus this research analyzes Japan's decision to stay in the *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* negotiations. To explain this, this study uses an approach initiated by Graham T. Allison, namely the *Bureaucratic Model*. The decision taken by Japan is analyzed by two main components namely 7 identification of the *bureaucratic model* and analysis of *bureaucratic models*.

**Katakunci :** *TPP, Japan, CPTPP, Politics of International Trade*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemitraan Trans Pasific atau *Trans Pacific Partnership* (TPP) adalah salah satu Perjanjian Perdagangan Bebas berbentuk multilateral yang beranggotakan beberapa negara-negara pengusul bagian Lingkar Pasifik yang terdiri dari beberapa negara seperti Brunei Darussalam, Cile, Selandia Baru, Singapura, pada 2005. Anggota perjanjian perdagangan tersebut semakin bertambah pada 2008 yaitu Amerika Serikat (AS), Australia, Vietnam, Peru, dan bertambah lagi dengan Kanada, Jepang, Meksiko dan Malaysia membuat jumlah anggota perjanjian semakin genap menjadi 12 anggota negara dengan AS menjadi pemimpin dalam negosiasi perjanjian perdagangan ini. Perjanjian ini menjadi perjanjian *Mega Trade Bloc* dari 12 negara anggota tersebut diatas kerangka hukum terhadap kerjasama perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi global (Pratomo, 2016).

Negara-negara anggota TPP sepakat bahwa perjanjian perdagangan ini akan menjadi kesepakatan perdagangan terbesar di dunia yang mencakup 40% dari perekonomian global, dengan pasar anggota yang lebih dari 800 juta penduduk, membuat dua kali lipat dari pasar tunggal Uni Eropa. Mereka juga bersepakat bahwa perjanjian kerjasama ini akan menguntungkan masing-masing negara anggota dan kawasan di Asia Pasifik, dimana hasil dari perjanjian ini nantinya diharapkan akan meningkatkan perdagangan antarnegara termasuk

investasi, memacu pertumbuhan kawasan ekonomi strategis, menurunkan harga produksi, menciptakan lapangan kerja baru, melindungi lingkungan industri dengan pendekatan dan standard regulasi yang berbeda-beda pada setiap anggota (BBC, 2017). Selain itu Perjanjian tersebut juga memiliki regulasi yang menuntut negara-negara anggotanya untuk membuka pasarnya agar lebih lebar terhadap perdagangan bebas sehingga akan memperlancar arus perdagangan global yang nantinya berdampak pada investasi namun dalam prosesnya

Diantara negara yang ikut dalam perjanjian dagang ini adalah Jepang yang memutuskan untuk bergabung pada 23 Juli 2013. Bergabungnya Jepang ke dalam TPP disebabkan oleh tiga alasan, Adapun alasan bergabungnya Jepang dalam TPP adalah, *Pertama* adanya keinginan Jepang untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Jepang dan menunjukkan peran eksistensi Jepang di Asia Pasifik setelah jalan panjang Putaran Doha yang belum menemukan jalan keluar, sehingga TPP akan menjadi peluang Jepang untuk menjadi bagian terpenting bagi Asia Pasifik. *Kedua*, Jepang selama ini merasa tertinggal dengan kerjasama perdagangan bebas meskipun telah menandatangani 13 perjanjian perdagangan. Hal tersebut juga direfleksikan dari dua negara tetangga yaitu Korea Selatan dan Tiongkok yang semakin maju dengan kerjasama dengan Uni Eropa dan AS pada 2012 lalu. Dengan demikian jika TPP dapat segera diterapkan maka akan menjadi peluang bagi Jepang untuk membentuk peraturan aktivitas ekonomi baru bagi kawasan Asia Pasifik. *Ketiga*, Jepang juga yakin bahwa TPP akan membantu meningkatkan reformasi ekonomi domestik yang juga masih dalam tingkat negosiasi dengan oposisi, dan terakhir TPP akan menjadi harapan bagi Jepang



untuk menjadikan negaranya strategis di kawasan pasar Asia (William Cooper, Mark Manyin, 2013).

Pada perkembangannya, terdapat dinamika dalam TPP dengan keluarnya Amerika Serikat pada tahun 2017 pasca terpilihnya Presiden Donald J. Trump dari perjanjian perdagangan multilateral tersebut yang beralasan perlindungan tenaga kerja domestik. TPP berubah nama menjadi *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) atau Kemitraan Trans Pasifik Komprehensif dan Progresif dengan anggota yang sekarang dikenal dengan TPP-11 pada Maret 2018. Mereka harus maju melanjutkan perundingan perjanjian yang telah mereka sepakati tanpa AS, negara TPP-11 mempertahankan beberapa regulasi didalam perundingan perjanjian perdagangan bebas tersebut tetap utuh. Perubahan sub-bab yang dianggap substansif dalam regulasi tersebut adalah bagian pembahasan properti intelektual yang telah dihapus, bab investasi juga mengalami perubahan, perubahan substansi *Investor State Dispute Settlement* (ISDS), dan beberapa hal mengenai regulasi ketenagakerjaan (McBride, 2018).

Keluarnya Amerika Serikat dari TPP membuat Jepang pada awalnya bersikap pesimis, ia menganggap keluarnya AS dari TPP akan berdampak terhadap pasar dikawasan strategis mitra, dimana AS memiliki 250 juta konsumen, sehingga jika AS keluar maka potensi pasar akan berkurang. (Nirmala, 2017). Selain itu Jepang juga menjadi negara yang paling merasakan kehilangan keuntungan dari keluarnya AS selain Vietnam dan Malaysia sehingga menurunnya potensi ekonomi dari US\$ 465 menjadi 157 US\$ Cicilia (2018). Disamping itu, Perdana Menteri Shinzo Abe menganggap kesepakatan yang terjalin dengan AS merupakan upaya Jepang untuk mendorong pertumbuhan dan

reformasi di domestik Jepang. Dengan keluarnya Amerika Serikat dari TPP maka, Abe menganggap aliansi perdagangannya tersebut semakin terlihat tidak bebas dan Abe melihat hilangnya peluang jika menggunakan visi strategis yang akan berdampak pada mundurnya tatanan perdagangan global (Vargö, 2018).

Meskipun Amerika Serikat sebagai partner dagang utama Jepang dalam TPP keluar, namun Jepang masih mempertahankan negosiasi dalam CPTPP. Upaya Jepang dalam mempertahankan perjanjian TPP semakin jelas dengan tekad Jepang untuk lebih terbuka terhadap perdagangan bebas dan mendukung perlawanan terhadap proteksionisme dan menciptakan area ekonomi terbuka terbesar didunia yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal ini didukung dengan terjalannya kerjasama ekonomi bilateral antara Jepang dan Uni Eropa yang ditandatangani pada pertemuan G20 (Idrys, 2017). Konsumen Jepang juga telah membuka lebar pasarnya untuk produsen AS namun ketentuan Jepang dalam soal keamanan harus dipatuhi, dimana impor penjualan tahunan yang berjumlah lebih dari 2000 unit tersebut membutuhkan penetapan tipe yang merupakan syarat pemerintah Jepang. Kemudian pembuat mobil harus menyerahkan kendaraan sampel kepada pemerintah Jepang untuk pemeriksaan produk guna mematuhi standar keamanan Jepang (Tanabe, 2012).

Pertimbangan Jepang untuk ikut bergabung dan mempertahankan perjanjian yang hampir dianggap gagal tersebut tentu bukan formalitas untuk mencapai tujuan perjanjian. Jepang melihat potensi yang sangat besar, TPP akan menjadi peluang akses pasar baru yang sangat menguntungkan bagi negara eksportir besar tersebut. TPP juga akan menjadi pendorong utama bagi reformasi

perekonomian Jepang dimana TPP akan meningkatkan produktivitas yang ada pada pasar Jepang termasuk investasi, meningkatkan daya saing yang semua hal tersebut akan berefek pada peningkatan PDB negara. Selain itu, bagi Shinzo Abe, keikutsertaan Jepang nantinya akan memberikan stimulus pada implementasi paket kebijakan ekonominya yaitu *Abenomics 2.0* yang akan lebih memberikan dampak yang signifikan pada pelonggaran moneter dan depresiasi mata uang Yen (mcbazer, 2013).

Dengan keluarnya Amerika Serikat dari TPP, tentu merupakan sebuah kerugian bagi Jepang, mengingat Amerika Serikat merupakan partner dagang utama dalam kerangka TPP. Meskipun demikian, keluarnya Amerika Serikat, tidak membuat Jepang mundur dari perjanjian perdagangan ini. Melainkan tetap berusaha untuk melanjutkan dan mempertahankan negosiasi kerjasama yang terjadi dalam CPTPP. Hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas. Mengingat membahas mengenai kelangsungan CPTPP dalam menghadapi tantangan dalam fase selanjutnya. Dengan demikian perlu juga untuk melihat strategi Jepang sebagai salah satu aktor utama dalam perjanjian perdagangan ini dalam melanjutkan proses negosiasi, oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai strategi yang digunakan Jepang dalam mempertahankan negosiasi kerjasama CPTPP.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa Jepang tetap mempertahankan negosiasi perjanjian kerjasama CPTPP paska keluarnya Amerika Serikat dari TPP ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a) Untuk menjelaskan strategi pemerintah Jepang dalam mempertahankan negosiasi perjanjian TPP paska keluarnya Amerika Serikat
- b) Untuk mengetahui alasan Jepang mempertahankan negosiasi perjanjian TPP paska keluarnya Amerika Serikat

### **1.3 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini merupakan salah satu upaya penting dalam memperdalam pengetahuan mengenai sistem politik pemerintah Jepang dalam perannya untuk mereformasi sistem ekonomi negara dalam upayanya mempersiapkan perundingan TPP dan salah satu upaya meningkatkan wawasan sejarah Jepang, mengingat negara tersebut merupakan negara yang dikenal dengan negara yang ketat dalam memproteksi produk ekspor sektor agrikultur dan tingginya tarif bea barang impor. Beberapa hal dalam penelitian ini memiliki pembahasan yang berbeda dari pada penelitian pada umumnya dimana penelitian ini hanya akan membahas mengenai upaya Jepang dalam mempertahankan negosiasi perjanjian CPTPP dengan berbagai strategi yang dilakukan dalam rentang waktu 2017 – 2018.

### **1.4 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini fokus pada politik luar negeri mengenai kebijakan ekonomi politik Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe mengenai kesiapan dan eksistensinya dalam negosiasi TPP, dimana Jepang sendiri mulai memberanikan diri untuk ikut bergabung dengan TPP pada tahun 2013 yang pada sebelumnya dibahas mengenai keinginan untuk bergabung pada pertemuan APEC 2011.

Jepang melakukan negosiasi selama kurang lebih 8 tahun untuk bergabung pada masa Yoshihiko Noda. Kemudian, hal menarik yang menjadi landasan penulis dalam penelitian ini adalah kebijakan untuk ikut serta dalam negosiasi CPTPP mendapat penolakan dari dalam domestik dan oposisi, namun keberlanjutan Jepang dalam CPTPP tetap berjalan, hingga akhirnya Jepang berhasil menjadi anggota aktif CPTPP bahkan menjadi *leader* pasca keluarnya AS. Dari kasus singkat ini penulis melihat bagaimana proses kebijakan luar negeri Jepang terkait ekonomi atau perdagangan diambil dapat meningkatkan eksistensinya dalam negosiasi CPTPP dengan menggunakan teori *Decision Making Proccess (Model Bureaucratic Model)* yang juga digunakan untuk melihat kepentingan Jepang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan cara mempersiapkan diri dalam ikut bergabung dan menjadi bagian penting dari negosiasi perjanjian CPTPP.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Kajian mengenai strategi Jepang dalam TPP dapat dilihat dari beberapa tulisan, menurut Mirey Solis dan Shujiro Urata (2017) kebijakan perdagangan Jepang di masa Shinzo Abe menjadi puncak kebangkitan ekonomi Jepang dimana Shinzo Abe melakukan pendekatan sebagai suatu peluang dalam memadukan kepentingan ekonominya yaitu dengan masuknya TPP, maka juga akan menjadi peluang untuk Jepang melakukan upaya, menciptakan peluang perdagangan dan investasi luar negeri untuk perusahaan Jepang melalui liberalisasi yang besar. Selain itu, Kebijakan Abenomics yang akan menjadi langkah reformasi liberalisasi bagi pertanian domestik meskipun kebijakan tersebut juga mendapat pertentangan kecil dari oposisi domestik. ketika Amerika Serikat (AS) memilih

keluar dari TPP, hal itu mempengaruhi dari tidak terpenuhinya target Abenomics memilih untuk melakukan kerjasama *multicooperation* dengan Eropa namun juga tetap mempertahankan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dimana didalamnya terdapat beberapa poin penting yang harus disepakati yaitu Hak Akses Obat, Hak Petani yang mewajibkan negara melindungi varietas tanaman. Jepang juga menambah mitra pada 2014 dengan Australia dan Perjanjian Perdagangan dengan Eropa pada 2017 yang memperlihatkan Jepang sebagai eksportir pertanian yang besar. (Mireya Solis and Shujiro Urata, 2017)

Sementara Hye Mi Nam (2017) berpendapat bahwa keseimbangan negosiasi Jepang dalam partisipasinya pada TPP dan kebijakannya terhadap produksi pertanian, dimana setelah terpilihnya Abe sebagai Perdana Menteri periode kedua pada 2012, ia langsung memutuskan masuk kedalam TPP. ia juga menjelaskan bahwa preferensi dari Abe terbagi dalam dua kelompok domestik yaitu Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI), Kementerian Luar Negeri (MOFA), komunitas bisnis dan Kelompok status quo atau kebijakan pertanian tradisional yaitu Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF), Norin Zoku, di Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Koperasi Pertanian Jepang (JA). Meski banyak pertentangan dari oposisi seperti JA yang giat melakukan demonstrasi anti TPP. tetapi dalam kepemimpinannya Abe tetap memberikan arahan terhadap kebijakan reformasinya terhadap JA dalam pertemuan ICC (Dewan Daya Saing Industri) yang memiliki komunitas petani untuk mempertahankan harga domestik yang tinggi untuk produk pertanian dan melakukan anti praktek bisnis kompetitif, dengan cara tersebut secara tidak langsung ICC dan CRR juga telah melemahkan kepentingan JA. Ketua Yasufumi

Kanemaru pada tahun 2014 juga merilis usulan penghapusan Koperasi Pertanian Pusat meskipun akhirnya harus direvisi karena tekanan dari LDP dan JA. Abe tetap dalam negosiasi TPP tapi Abe memilih pengecualian tertentu dalam perjanjian TPP terhadap AS. Pembayaran sampingan adalah salah satu upaya antisipasi hasil dari TPP, kemudian langkah melalui MAFF merancang organisasi untuk mediasi pengelolaan lahan pertanian dan sistem pembayaran langsung sebagai upaya penyesuaian produksi beras. Menurutnya, kepemimpinan Abe yang kuat berhasil mengubah cara pandang preferensi dan koalisi konstituen Jepang untuk mendukung kebijakan TPP-nya, dengan secara politik telah mengurangi pengaruh kekuasaan oposisi JA dengan diciptakannya reformasi pertanian yang disebut dengan "*historical major agricultural reform*", kedua ia juga memasukkan pembuat kebijakan masuk untuk mengacu pada negosiasi TPP reformasi agrikultur oleh eksekutif, semua kementerian mengacu pada Abe dan hak veto MAFF dibatasi dan melemah. ia juga dianggap berhasil menekan perlawanan dari Norin Zoku. dan Meti, Zoku MOFA (Kebijakan komersial industri) sebagai kantei adalah pendukung kuat partisipasi TPP Jepang. denganya ia bisa menekan JA sebagai jalur untuk menyetujui TPP. (Nam, 2017)

Sementara itu Awele Oguejiofor dan Uzoamaka Unachukwu (2015) menjelaskan bahwa Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe telah menggunakan pendekatan Keynesian untuk mengatasi perekonomian dalam negerinya yang dikenal dengan Abenomics yang fokusnya pada pembelanjaan pemerintah dalam permasalahan perkerjaan, dimana akan mengarah pada penciptaan lapangan pekerjaan yang nantinya akan meningkatkan ekonominya dari stagnasi, selain itu Pemerintah dalam meningkatkan perekonomiannya

menggunakan model pembangunan campur tangan antara pemerintahan dan perencanaan ekonomi, pasar Jepang tidak mengacu pada perdagangan bebas namun mengacu pada kepentingan nasional itu sendiri. Dalam artikel ini, penulis juga memberikan gambaran asumsi berupa saran untuk pembangunan ekonomi Jepang, dimana pertama ia meletakkan tiga faktor penting dalam memerankan pembuatan kebijakan ekonomi, yaitu politik, sosial dan budayanya dimana harus saling terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian, pemerintah seharusnya mengadopsi sistem imigrasi berbasis poin guna menarik pekerja lebih terampil, meningkatkan tingkat kelahiran, mengeluarkan kebijakan yang lebih inklusif agar perempuan ikut terdorong untuk berpartisipasi dalam pekerjaan umum, meningkatkan energi negara dan meningkatkan investasi asing yang dikontekstualisasikan dan disesuaikan pada kebutuhan dan realitas negara tersebut. (Awele Oguejiofor, Uzoamaka Unachukwu, 2015)

Kemudian menurut Takeo Hoshi (2018) FDI di Jepang merupakan salah satu kebijakan utama yang menjadi strategi untuk pertumbuhan cepat yang dirumuskan pada 2013. menurutnya, meskipun Abenomics yang merupakan reformasi terbaru Shinzo Abe sudah berjalan namun, promosi FDI terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berpengaruh. secara umumnya dengan beberapa bukti dapat disimpulkan bahwa peningkatan FDI terhadap pertumbuhan adalah lemah yang menimbulkan beberapa keraguan mengenai promosi FDI, hal ini disebabkan oleh salah satu faktor, misalnya tingginya pembiayaan bisnis, administrasi FDI kedalam Jepang yang rumit, dan kepercayaan perusahaan asing terhadap Jepang meningkat 10% yang artinya keamanan karyawan lebih terjaga meski demikian hal ini juga memperlihatkan faktor kekurangan tenaga kerja di



Jepang, namun jika melihat rencana meningkatkan saham FDI menjadi 35 triliun yen pada 2020. pada kenyataannya dapat dilihat bahwa pada 2012 hingga 2015 memang meningkat dari 19,2 triliun yen menjadi 24,4 triliun yen. ini menunjukkan bahwa reformasi Abenomics pada promosi FDI memiliki pengaruh dalam peningkatan ekonomi, namun tidak terlalu signifikan. (Hoshi, 2018)

San Feng dan Zhang Xiao-lan (2014) memaparkan bahwa reformasi Jepang dianggap telah berpengaruh secara signifikan dalam waktu pendek, sehingga Jepang mengalami pemulihan yang sangat cepat, meskipun misi reformasi ekonomi tersebut masih banyak yang harus diselesaikan dan dibuktikan oleh waktu pelaksanaan Abenomics itu sendiri. kebijakan tersebut pastilah terdapat konflik yang inheren dan kesulitan dalam penerapan namun dapat terkompromikan dengan hasilnya. dibawah kebijakan fiskal yang ketat, lemahkan permintaan domestik, resistensi yang berat terhadap reformasi regulasi, prospek pertumbuhan ekonomi Jepang dalam jangka waktu menengah diprediksi tidak optimis dan tampaknya misi tersebut sulit diselesaikan. (SAN Feng, ZHANG Xiao-lan, 2014)

Dari penelitian-penelitian diatas semuanya membahas mengenai reformasi ekonomi Jepang, dengan menggunakan berbagai pendekatan yang telah dijelaskan dalam menganalisa reformasi ekonomi Jepang untuk membuktikan hipotesa yang dimilikinya. Penelitian ini dibuat juga untuk menambahkan serta melengkapi dari penelitian yang belum dibahas pada penelitian-penelitian tersebut. Selain itu, penelitian ini memfokuskan pada kajian ekonomi politik Jepang dalam menjalankan kebijakan luar negerinya yang digunakan untuk mempertahankan eksistensinya dalam CPTPP dengan menggunakan teori pengambilan keputusan

(*decision making*) milik Graham T. Allison dengan melihat proses pengambilan kebijakan dari faktor yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan tersebut, pertimbangan dan tantangannya dan juga untung-rugi pada saat pengambilan keputusan tersebut diambil.

## **1.6 Landasan Konseptual**

### ***Bureaucratic Model (Decision Making Process)***

Proses kebijakan politik luar negeri terbentuk merupakan salah satu hal menjadi pembahasan dalam kajian ilmu hubungan internasional. Diantara banyak pemikir ilmu hubungan internasional adalah Graham T. Allison yang mencoba menjelaskan proses munculnya sebuah kebijakan politik luar negeri terbentuk. Dalam artikel yang ditulis oleh Allison, menerangkan mengenai tiga model yang dapat digunakan dalam menjelaskan kebijakan politik luar negeri. *Pertama*, Model I *Rational Policy*, merupakan pendekatan yang mengambil negara sebagai aktor utama, dalam hal ini dilalui dengan tahapan berupa penentuan tujuan, alternatif-alternatif, konsekuensi dan pilihan keputusan. *Kedua*, Model II *Organizational Process Model*, merupakan pendekatan yang menekankan pada pembuatan kebijakan luar negeri ditentukan oleh adanya mekanisme prosedural yang berlaku dalam suatu negara. *Ketiga*, Model III, *Bureaucratic Politics Model*, merupakan pendekatan yang menekankan pada pengambilan kebijakan luar negeri ditentukan oleh tarik ulur dari berbagai pihak, kelompok kepentingan dan *stakeholders* lain. Dengan demikian keputusan yang muncul merupakan resultan dari proses politik yang panjang (Allison, 1969, 689-91).

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan alasan Jepang yang pada akhirnya mempertahankan negosiasi CPTPP meskipun Amerika Serikat selaku aktor utama telah keluar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penelitian ini menggunakan tinjauan Model III “*Bureaucratic Politics Model*” mencoba untuk menjelaskan terbentuknya Kebijakan Politik Luar Negeri.

Dalam penjelasan yang diberikan Graham T. Allison digambarkan bahwa pendekatan “*Bureaucratic Politics Model*” ini digunakan untuk menjelaskan mengenai studi kasus keamanan yaitu pada saat penentuan kebijakan Amerika Serikat saat krisis misil Kuba. Sehingga dengan jelas penjabaran dilakukan dengan contoh dalam studi kasus keamanan, namun pendekatan ini tidak hanya terbatas untuk studi keamanan, melainkan juga semua hal yang terkait dengan proses penentuan atau pengambilan kebijakan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Graham T. Allison dalam tulisannya menjabarkan bahwa setiap kebijakan merupakan hasil dari politik “*Basic Unit of Analysis : Policy as Political Outcome*”.

*“The decisions and actions of governments are essentially intra-national political outcomes in the sense that what happens is not chosen as a solution to a problem but rather results from compromise, coalition, competition, and confusion among government officials who see different faces of an issue; political in the sense that the activity from which the outcomes emerge is best characterized as bargaining. Following Wittgenstein’s use of the concept of a “game,” national behavior in international affairs can be conceived as outcomes of intricate and subtle, simultaneous, overlapping games among players located in positions, the hierarchical arrangement of which constitutes the government. These games proceed neither at random nor at leisure. Regular channels structure the game. Deadlines force issues to the attention of busy players. The moves in the chess game are thus to be explained in terms of the bargaining among players with separate and unequal power over particular pieces and with separable objectives in distinguishable subgames” (Allison, 1969, p. 708).*

Kutipan diatas menunjukkan bahwa keputusan dan aksi suatu negara merupakan hasil dari dialektika aktor intra-nasional (domestik). Sehingga pendekatan ini fokus pada proses terbentuknya sebuah sikap, keputusan, tindakan

atau kebijakan dari sebuah pemerintahan (negara). Oleh karena hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan ini, meskipun menjadikan studi kasus misil Kuba sebagai studi penelitian, namun tidak hanya studi keamanan yang dapat dijelaskan menggunakan pendekatan ini. Selama suatu studi kasus berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan, keputusan atau tindakan. Maka hal-hal tersebut dapat dijelaskan menggunakan pendekatan ini termasuk dalam menjelaskan alasan Jepang tetap bertahan dalam negosiasi CPTPP paska keluarnya Amerika Serikat pada 2017. Hal ini disebabkan dalam prosesnya, bertahanya Jepang dalam negosiasi CPTPP juga merupakan hasil dari dialektika aktor intra-nasional Jepang.

Sebagai perangkat analisis lanjutan dalam menganalisis bagaimana sebuah kebijakan terbentuk. Graham T. Alisson menggunakan identifikasi terhadap masalah yang terjadi. Dalam hal ini Alisson menjabarkan tujuh (7) hal yang harus di indentifikasi sebelum melakukan analisis. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut;

*a. Players in Positions*

Dalam hal ini merupakan pihak-pihak yang dapat memainkan peran dalam penentuan kebijakan politik luar negeri. Hal tersebut semakin penting apabila seorang pemain menjabat dalam posisi penting dalam sebuah pemerintahan. Dalam artikel, Alisson mencontohkan bahwa posisi seperti direktur intelegen, menteri luar negeri, presiden dll. Pada penelitian ini penulis menjabarkan mengenai pihak-pihak yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan di

Jepang yang mempengaruhi kebijakan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP (Allison, 1969, pp. 708-9).

***b. Parochial Priorities, Perceptions and Issues***

Pada hal ini setiap pemain memiliki prioritas terbatas, persepsi dan isu-isu mengenai hal yang berkaitan dengan sebuah isu yang dibahas. Dengan demikian memungkinkan terdapat perbedaan prioritas antara sesama pemain. Dalam penelitian ini berusaha untuk menjabarkan prioritas terbatas, persepsi dan isu yang diperjuangkan sehingga mendorong adanya sikap Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP (Allison, 1969, p. 709).

***c. Interest, Stakes and Power***

Pada hal ini setiap pemain juga memiliki kepentingan, taruhan dan kekuatan. Masing-masing berlomba agar kepentingan tercapai, adapun kepentingan yang berhasil ditentukan oleh kekuatan dan kekuatan tawar yang dimiliki. Dengan demikian pada penelitian ini menjabarkan mengenai kepentingan, taruhan dan kekuatan yang bermain dalam pengambilan keputusan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP (Allison, 1969, p. 710).

***d. The Problems and the Problems***

Pada tahap ini membahas mengenai konsekuensi dari masalah yang muncul. Dalam hal ini masalah muncul lebih kepada ketika sudah mencapai “*deadline*” atau tenggat waktu. Sehingga masalah tersebut harus diatasi oleh pemain. Dalam penelitian ini, maka akan menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi oleh

pemain dari konsekuensi keputusan yang mereka ambil dalam mendorong adanya negosiasi CPTPP (Allison, 1969, p. Ibid).

***e. Action Channels***

Pada hal ini merupakan sarana yang akan digunakan oleh pemain dimana mengandung dua komponen yaitu “keuntungan” dan “kerugian”. Dari beberapa opsi yang diusulkan oleh beberapa pemain maka dipertimbangkan aspek keuntungan mana yang paling besar. Dengan demikian penelitian ini juga mencari tahu mengenai saran aksi seperti apa yang ditawarkan oleh pemain-pemain yang ada, lantas manakah yang pada akhirnya menghasilkan keputusan Jepang dalam sikapnya yang mempertahankan negosiasi CPTPP (Allison, 1969, p. Ibid).

***f. Action as Politics***

Pada tahap ini, keputusan yang dibuat pemerintah tidaklah dibuat secara kebijakan yang telah diperhitungkan maupun sikap tunggal dari pemerintah. Melainkan dibuat berdasarkan beberapa opsi-opsi yang ditawarkan oleh beberapa pemain kepada pemerintah. Pada akhirnya dipilih sesuai dengan fakta yang aktual dan konsekuensi yang jelas sesuai pertimbangan negara. Dengan demikian tercipta sebuah kebijakan dari pemerintah. Penelitian ini juga menjelaskan opsi-opsi yang ditawarkan oleh beberapa *stakeholders* sebelum Jepang memutuskan untuk tetap mempertahankan negosiasi CPTPP (Allison, 1969, p. Ibid)

***g. Streams of Outcome***

Pada akhirnya keputusan pemerintah dihasilkan dari kumpulan tindakan beberapa pemain “*individu*”, hasil minor, permainan utama dan pelanggaran.

Dengan demikian merupakan rumusan dari beberapa hal yang telah ditentukan dari tahap-tahap sebelumnya. Penelitian ini juga melihat pengaruh signifikan dari aktor mana yang berpengaruh pada pembuatan keputusan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP (Allison, 1969, p. Ibid).

Sementara itu, setelah identifikasi 7 hal maka terdapat tiga preposisi umum dalam “*Bureaucratic Model*”. Tiga preposisi tersebut adalah sebagai berikut;

### ***1. Actions and Intention***

Tindakan tidak dimulai (diandaikan) dengan niat. Perilaku dari tindakan pemerintah pada isu-isu berkaitan jarang diawali dengan niatan dari individu ataupun kelompok. Melainkan individu-individu terpisah dengan berbagai niatan berkontribusi sebagai bagian-bagian dalam menyusun hasil keluaran yang berbeda dari yang akan dipilih. Dengan demikian dalam hal ini, sebuah kebijakan muncul akibat percampuran dari berbagai niatan dari aktor-aktor individu yang terlibat dalam pengambilan kebijakan (Allison, 1969, 711). Dengan demikian, maka penelitian ini menjabarkan niatan dari pemain atau aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP.

### ***2. Where You Stand Depend On Where You Sit***

Secara horizontal, aktor-aktor yang terlibat tentu memiliki permintaan yang masing-masing berbeda. Beragamnya permintaan juga merupakan hal yang membentuk hal-hal yang dituju seperti prioritas, persepsi dan isu. Sementara itu, sikap dari aktor-aktor dapat diprediksi dengan tingkat akurasi yang tepat dengan menggunakan dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan posisi yang dia miliki. Oleh karena itu dalam hal ini Alisson menyebut “*where you stand depend*

*on where you sit*". Dipahami bahwa sikap, prioritas dari pemain dapat diketahui melalui kursi "*seat*" yang dimiliki. Alisson juga mencontohkan bagaimana testimoni Admiral Radford terkait dengan masalah B-36 berbeda dengan klaim Sekretaris Angkatan Udara Amerika Serikat, Mr. Symington. Perbedaan ini terkait dengan posisi atau "*seat*" yang keduanya duduki. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya interseksi antara permintaan-permintaan yang dimiliki oleh masing-masing aktor membentuk tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu hal itu dapat diprediksi atau diketahui melalui posisi yang aktor atau pemain duduki (Allison, 1969, Ibid). Dengan demikian maka penelitian ini menjelaskan mengenai posisi yang di duduki oleh aktor-aktor atau pemain yang terlibat dalam perumusan kebijakan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP.

### **3. *Chiefs and Indians***

Disamping memiliki aspek horizontal, perkataan "*where you stand depends on where you sit*" juga memiliki aspek vertikal. Hal ini berkaitan dengan tuntutan yang cenderung berbeda terhadap "*President, Chief, Staffers* dan *Indians*". Dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri, maka pihak yang akan memikirkan secara matang merupakan pemain-pemain dalam Kementerian Luar Negeri bersama Menterinya. Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya dalam merumuskan setiap tindakan kebijakan politik luar negeri, mengingat jadwal padat yang dimiliki. Presiden hanya memberikan perhatian pada isu-isu yang dianggap sangat penting. Dengan adanya pada isu-isu yang dianggap sekunder maka Kemlu harus memikirkan hal tersebut secara matang, mengingat presiden memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Akibat adanya perumusan yang dilakukan pada level bawah presiden maka tidak menutup kemungkinan terjadi tarik ulur antara



pihak yang berada dibawah presiden tersebut, semisal antara kementerian. Hal tersebut juga belum meliputi tuntutan yang disuarakan oleh orang Indian. Dengan demikian dipahami bahwa terdapat tuntutan-tuntunan tertentu yang sifatnya vertikal. Dalam hal ini tuntutan yang mendapatkan izin atau diakui presiden merupakan hal yang dapat dianggap sebagai hal yang penting (Allison, 1969, Ibid). Dalam penelitian ini maka penulis menjabarkan mengenai tuntutan-tuntunan vertikal yang merupakan pergulatan dari *Chief* dan *Indians*. Dimana pergulatan tersebut kemudian mendorong Perdana Menteri Jepang untuk mempertahankan negosiasi CPTPP.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Pada penulisan penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian dengan pengumpulan data yang bersifat kualitatif, namun tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan data kuantitatif sebagai data pendukung. metode penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian yang menelaah dan mencermati suatu fenomena sosial dalam situasi yang sedang berlangsung secara ilmiah dan bukan dalam situasi yang sudah terkontrol atau dikendalikan.

#### **a. Subjek dan Objek Penelitian**

Menurut Arikunto (2006), subyek penelitian adalah sesuatu hal yang memiliki sifat dan keadaan yang bisa diteliti yang dapat berupa orang, benda, komunitas maupun organisasi atau subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.

Menurut Husein Umar (2005) Obyek Penelitian adalah hal yang menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi obyek penelitian dan juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini Adapun obyek yang akan diteliti adalah upaya domestik Jepang dalam mempertahankan perjanjian CPTPP dan segala hal yang berkaitan dengan peran baik pada level pemerintahan maupun maupun pada masyarakat.

#### **b. Metode Pengumpul Data**

Sesuai dengan jenis penelitian, dokumentasi berupa kata-kata akan diolah bukan berupa angka yang dapat terhitung dimana data-data kualitatif akan menjelaskan gambaran penelitian. Adapun ada 3 cara dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara langsung, observasi dan pemanfaatan dokumen tertulis. (Quinn, 1991)

Namun dalam penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data pemanfaatan dokumen tertulis. Pemanfaatan Dokumen Tertulis, cara pengumpulan data ini yaitu melalui penelusuran berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang sesuai dengan tema atau topik yang diambil. Data yang diambil pun dapat berupa primer yaitu sumber data yang langsung diambil dari website resmi Jepang dan TPP atau lembaga yang berkaitan dan juga menggunakan data sekunder yang berupa tulisan-tulisan, jurnal, artikel lembaga lain yang terkait dengan upaya Jepang dalam mempertahankan perjanjian TPP. Sesuai dengan ketentuan dalam penelitian, dalam proses penelitian, penulis juga akan membutuhkan studi literatur atau kajian pustaka. selain

itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bersifar primer dan data sekunder. data primer dapat diperoleh beberapa situs resmi dan beberapa data-data langsung dari pemerintah Jepang melalui website resmi. sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah. kemudian penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk menjabarkan argumentasi dalam penelitian ini.

### **c. Proses Penelitian**

Proses dalam penelitian ini menggunakan kajian deskriptif-analitik, yang bertujuan untuk menjelaskan gambaran peran, upaya dan juga kontribusi Jepang dalam mempertahankan perjanjian CPTPP pada masa pemerintahan Shinzo Abe. Hal yang menjadi fokus utama pertama adalah strategi Jepang dalam mempertahankan negosiasi perjanjian tersebut.

Hal yang pertama dalam pembahasan kajian deskriptif-analitik adalah studi kepustakaan yang mencari data-data informasi mengenai CPTPP kemudian mengenai mengenai bergabungnya Jepang dengan CPTPP, Kemudian dilanjutkan dengan analisis data terkait informasi yang sudah dihimpun dalam rangka untuk mengetahui upaya dan peran dari Jepang dalam mempertahankan perjanjian TPP pada masa pemerintahan Shinzo Abe 2017-2018.

## BAB II

### STRATEGI JEPANG DALAM MEMPERTAHANKAN NEGOSIASI

#### CPTPP 2017-2018

Bab ini membahas mengenai strategi Jepang dalam mempertahankan negosiasi *Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) paska keluarnya Amerika Serikat dari organisasi kerjasama perdagangan global tersebut. Dengan demikian maka juga dijabarkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Oleh karena itu dalam bab ini dibagi menjadi 2 sub pembahasan. Pertama, mengenai perkembangan negosiasi perjanjian yang ada dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Kedua, mengenai negosiasi yang terjadi dalam TPP paska keluarnya Amerika Serikat, dimana disepakati munculnya *Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) serta strategi yang digunakan oleh Jepang dalam menjaga keberlangsungan negosiasi yang ada dalam *Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP).

#### 2.1 Perkembangan Negosiasi Perjanjian CPTPP

##### a. *Trans-Pacific Partnership*

Awal mulanya, organisasi perdagangan bebas kawasan ini diinisiasi oleh tiga negara yaitu Singapura, Selandia Baru dan Chili. Tahun 2002 merupakan awal mula pembentukan di sela-sela KTT *Asia-Pacific Economic Cooperation*. Pembentukan "*Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement*"

organisasi ini bertujuan untuk membuka pasar bebas di kawasan Asia Pasifik (Mofa New Zealand, pp. 2-5). Dengan demikian negara-negara anggota dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Sejalan dengan perkembangan waktu, Brunei Darussalam bergabung pada tahun 2005. Bergabungnya Brunei Darussalam menjadikan organisasi ini mendapatkan nama baru yaitu “*The Trans Pacific Strategic Economic Parthnership Agreement*” (TPSEP atau P4). Pada 2009, Amerika Serikat bergabung dengan organisasi ini, bergabungnya Amerika Serikat didorong oleh adanya kebuntuan dalam *Doha Round* yang membahas mengenai liberalisasi pasar (Granville, 2017).

Bertambahnya Amerika Serikat sebagai anggota juga menjadi titik penting transformasi organisasi perdagangan bebas ini. Perubahan juga terjadi pada nama organisasi ini menjadi “*Trans Pacific Parthnership*” (TPP). Munculnya *Trans Pacific Partnership* (TPP) dibawah pimpinan Amerika Serikat juga mendorong negara-negara lain untuk bergabung. Sejak tahun 2009 hingga 2013, sejumlah negara bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Pada tabel 2.1 menunjukan sejumlah negara yang tergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

<p style="text-align: center;"><b>Tabel 2.1</b> <b>Anggota <i>Trans Pacific Partnership</i></b></p>		
<b>No.</b>	<b>Negara</b>	<b>Tahun Keanggotaan</b>
1.	Amerika Serikat	2008
2.	Australia	2008
3.	Brunei Darussalam	2005

4.	Chili	2002
5.	Jepang	2013
6.	Kanada	2012
7.	Malaysia	2010
8.	Meksiko	2012
9.	Peru	2008
10.	Selandia Baru	2002
11.	Singapura	2002
12.	Vietnam	2008
Sumber : (Cerdeiro, 2016, p. 04)		

Terdapat 19 negosiasi TPP yang terjadi dalam kurun waktu 2010 hingga tahun 2015. Dalam TPP menghasilkan beberapa kesepakatan. Pada tabel 2.2 menjabarkan mengenai lokasi dan tempat terjadinya pertemuan dan negosiasi (Congressional Research Service, 2013, p. 02).

<b>Tabel 2.2</b>		
<b>Negosiasi-negosiasi TPP 2010-2015</b>		
<b>No.</b>	<b>Tempat &amp; Tanggal Pelaksanaan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Putaran 1, Melbourne, Australia, 18-19 Maret 2010	Negosiasi
2.	Putaran 2, San Fransisco, Amerika Serikat, 14-18 Juni 2010	Negosiasi
3.	Putaran 3, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 5-8 Oktober 2010	Negosiasi
4.	Putaran 4, Auckland, Selandia Baru, 6-10 Desember 2010	Negosiasi

5.	Putaran 5, Santiago, Chili, 14-18 Februari 2011	Negosiasi
6.	Putaran 6, Singapura, 24 Maret-1 pril 2011	Negosiasi
7.	Putaran 7, Ho Chi Minh, Vietnam, 15-24 Juni 2011	Negosiasi
8.	Putaran 8, Chichago, Amerika Serikat, 6-16 September 2011	Negosiasi
9.	Putaran 9, Lima, Peru, 22-29 Oktober 2011	Negosiasi
10.	Putaran 10, Kuala Lumpur, Malaysia, 5-9 Desember 2011	Negosiasi
11.	Putaran 11, Victoria, Australia, 2-9 Maret 2012	Negosiasi
12.	Putaran 12, Texas, Amerika Serikat, 8-18 mei 2012	Negosiasi
13.	Putaran 13, San Diego, Amerika Serikat, 2-10 Juli 2012	Negosiasi
14.	Putaran 14, Lessburg, Amerika Serikat, 6-15 September 2012	Negosiasi
15.	Putaran 15, Auckland, Selandia Baru, 3-12 Desember 2012	Negosiasi
16.	Putaran 16, Singapura, 4-13 Maret 2013	Negosiasi
17.	Putaran 17, Lima, Peru, 15-24 Mei 2013	Negosiasi
18.	Putaran 18, Kinabalu, Malaysia, 14-24 Juli 2013	Negosiasi
19.	Putaran 19, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 23-30 Agustus 2013	Negosiasi
Sumber : (SICE, 2019)		

Selain 19 putaran negosiasi, juga terjadi beberapa negosiasi dan pertemuan yang dilakukan negara-negara anggota. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan TPP. Tercapainya TPP meliputi peraturan yang berisi 30 bab yang membahas mengenai isu-isu yang terkait dengan “*trade-related issues, beginning with trade in goods and continuing through customs and trade facilitation; sanitary and phytosanitary measures; technical barriers to trade; trade remedies; investment; services; electronic commerce; government procurement; intellectual property; labour; environment; ‘horizontal’ chapters meant to ensure that TPP fulfils its potential for development, competitiveness, and inclusiveness; dispute settlement, exceptions, and institutional provisions*” (Ustr.gov, 2015).

Disamping itu juga disepakati lima fitur atau garis besar dalam TPP. Kelima hal tersebut adalah; Pertama, *Comprehensive market access*, yaitu TPP menghilangkan hambatan baik tarif maupun non-tarif pada semua bidang ekonomi termasuk barang, jasa dan investasi. Dengan demikian akan meningkatkan kesempatan terhadap pemain-pemain dalam pasar; Kedua, *Regional approach to commitments*, TPP memfasilitasi pengembangan produksi dan rantai suplai dalam rangka meningkatkan produktifitas ekonomi; Ketiga, *Addressing new trades challenges*, TPP mempromosikan inovasi, produktifitas dan kompetisi dalam menghadapi isu-isu kekinian termasuk pengembangan ekonomi digital; Keempat, *Inclusive trade*, TPP berusaha memberikan kesempatan ekonomi kepada semua pemain dalam pasar, termasuk Usaha Kecil Menengah dalam berkompetisi dan memaksimalkan keuntungan ekonomi. Serta memastikan semua pihak terpenuhi hal-hal yang diinginkan; Kelima, *Platform for regional*



*integration*, TPP ditujukan untuk menjadi landasan integrasi ekonomi kawasan serta tambahan ekonomi di seluruh Asia-Pasifik (Ustr.gov, 2015).

Meskipun telah menjadi dokumen yang telah diselesaikan dalam negosiasi, namun TPP-12 tidak berhasil dilanjutkan. Hal ini disebabkan keputusan Amerika Serikat yang mundur dari TPP di tahun 2017, paska Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Donald Trump menilai perjanjian TPP memberikan dampak yang negatif atau merugikan bagi ekonomi Amerika Serikat. Sehingga menganggap keluarnya Amerika Serikat dari organisasi merupakan pilihan yang tepat dengan slogan kampanye Donald Trump yaitu “*America First*”. Keluarnya pemimpin serta mitra dagang terbesar TPP-12 dari organisasi tentu memaksa terjadinya re-orientasi perjanjian perdagangan bebas (CNN Indonesia, 2017).

## **2.2 TPP Paska Keluarnya Amerika Serikat : CPTPP**

Keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari organisasi perdagangan bebas regional TPP pada tahun 2017 merupakan salah satu janji kampanye presiden Donald Trump yang ditepati. Keluarnya Amerika Serikat juga membuat organisasi perjanjian perdagangan bebas kawasan ini mengubah nama. Pada tahun 2018, organisasi yang awalnya bernama (TPP-12) berubah menjadi “*Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership*” (CPTPP) atau TPP-11. Hal yang membedakan TPP-11 dengan TPP-12 adalah selain non-partisipasi Amerika Serikat, juga terdapat beberapa perubahan yang dilakukan dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut.

Keluarnya Amerika Serikat dari TPP didorong oleh beberapa pertimbangan. Diantara hal yang paling dipercayai oleh Donald Trump adalah bergabungnya Amerika Serikat dalam TPP mengakibatkan berkurangnya pekerjaan yang tercipta di Amerika Serikat. Berkurangnya pekerjaan yang tersedia disebabkan karena pekerjaan tersebut berpindah sebagai konsekuensi adanya perjanjian perdagangan bebas seperti TPP. Dengan demikian Donald Trump kembali menegaskan komitmen untuk mendahulukan janji kampanye dengan slogan “*America First*”. Dalam pidatonya pada tahun 2017, Donald Trump menilai bahwa perdagangan harus dilakukan dengan adil, merujuk pada perjanjian yang tidak adil seperti TPP.

*"Kita akan melakukan perdagangan tetapi kita akan melakukannya dengan masing-masing negara. Dan jika ada yang bertingkah, kita akan mengirim surat peringatan penghentian, 30 hari dan mereka harus meluruskan itu, atau kita pergi. Tak satu pun dari perjanjian ini mencegah kita keluar jika menjadi merugikan. Jadi kita akan memiliki banyak perjanjian perdagangan. Tapi TPP itu bukan cara yang benar"* (Voa Indonesia, 2017).

Donald Trump juga menambahkan pada pidatonya bahwa TPP merupakan kesepakatan perjanjian perdangan bebas yang buruk dan merugikan bagi Amerika Serikat.

*"Kemitraan Trans Pasifik merupakan serangan terhadap bisnis Amerika. Ini tidak menghentikan manipulasi mata uang China. Ini adalah kesepakatan yang buruk"*. (Voa Indonesia, 2017)

Tentu saja kepergian Amerika Serikat dari TPP menjadi paradoks bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini mengingat TPP bukan merupakan sebuah kebijakan yang murni untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi. Melainkan juga menjadi instrumen politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan dalam menghadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, termasuk dalam munculnya pengaruh besar Tiongkok di kawasan. Sebelumnya pada masa presiden Barack Obama, Amerika

Serikat memiliki beberapa keuntungan dalam bergabung dengan TPP. Adapun keuntungan tersebut diantaranya meningkatkan ekonomi Amerika Serikat secara menyeluruh seperti upah kepada tenaga terdidik dan tidak terdidik, yang mana pendapatan yang didapatkan dari adanya upah tenaga kerja akan lebih besar dari *capital income* (Cimino-Isaacs, 2016, pp. 63-4).

Keuntungan-keuntungan bagi Amerika Serikat yang telah disebutkan diatas tentu saja telah diabaikan oleh Donald Trump. Sehingga aspek-aspek non-ekonomi Amerika Serikat tidak dijadikan sebagai prioritas utama Amerika Serikat sebagai landasan politik luar negeri. Dengan demikian maka pembahasan ini krusial bagi titik balik TPP.

*“...It is the policy of my Administration to represent the American people and their financial well-being in all negotiations, particularly the American worker, and to create fair and economically beneficial trade deals that serve their interests. Additionally, in order to ensure these outcomes, it is the intention of my Administration to deal directly with individual countries on a one-on-one (or bilateral) basis in negotiating future trade deals. Trade with other nations is, and always will be, of paramount importance to my Administration and to me, as President of the United States. (White House, 2017)*

#### **a. Respon Domestik Jepang terhadap keluarnya AS dari TPP**

Paska keluarnya Amerika Serikat, Jepang secara cepat melakukan upaya untuk ratifikasi perjanjian baru CPTPP atau TPP-11 (Nikkei, 2018). Bahkan menurut Toshimitsu Motegi, menteri Ekonomi dan negosiasi TPP mengatakan bahwa Jepang ingin menjadi diantara negara pertama yang melakukan ratifikasi TPP-11, *“Japan wants to be among the first to get it passed* (Nikkei, 2018).

Dengan demikian diketahui bahwa percepatan ratifikasi TPP-11 sangat diperlukan oleh Jepang. Mundurnya Amerika Serikat TPP juga mendapatkan respon dari pihak-pihak (aktor-aktor) yang berada di domestik Jepang. *Pertama*, Pihak koalisi pemerintahan yang terdiri dari Partai Demokratik Liberal (LDP) dan

Partai *Komeito* memberikan respon yang cukup terkejut. Disamping itu Presiden sekaligus ketua koalisi LDP-Komeito juga paska keluarnya Amerika Serikat, Jepang tetap berharap bahwa Amerika Serikat dapat kembali bergabung dengan perjanjian perdagangan bebas ini. Sementara itu keluarnya Amerika Serikat dari TPP membuat Jepang lebih mengambil peran yang besar dalam perjanjian kawasan tersebut. *Kedua*, sikap tersebut juga mendapatkan respon dari partai oposisi terbesar “*Partai Demokratik Konstitusional Jepang*” (CDP). CDP mempertanyakan tindakan pemerintah Jepang dibawah LDP yang tergesa-gesa dalam mendorong ratifikasi TPP baru dalam parlemen. Kritik keras ini ditujukan dalam rangka pembelaan CDP terhadap sektor pertanian Jepang yang mendapatkan kerugian, dengan timbal balik keuntungan dalam ekspor industri (Agrinews, 2018).

*Ketiga*, disamping dari sektor politik, terdapat ketua kelompok asosiasi pengusaha Jepang (*Keindanren*) Mr. Sadayuki Sakakibara juga memberikan komentar terkait keluarnya Amerika Serikat dari TPP;

*With the announcement of the U.S. withdrawal from the TPP by President Donald Trump, now is not the time to discuss the issue with the U.S. government. The withdrawal of the U.S. has reduced the economic and geopolitical benefits of the TPP.... While we hope that the United States will rejoin the TPP in the future, it is important first that TPP-11 be realized at an early stage.* (Keindanren, 2017)

Dalam pernyataan tersebut, ketua asosiasi pebisnis Jepang mengharapkan bergabungnya Amerika Serikat kembali dalam TPP. Sikap kelompok ini terhadap Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa TPP dinilai membawa perusahaan-perusahaan Jepang pada level global, dengan demikian dapat membawa keuntungan yang besar.

Dengan pembahasan diatas maka dapat ditarik garis besar bahwa terdapat kekecewaan yang terjadi dalam domestik Jepang mengenai keputusan Amerika Serikat meninggalkan TPP. Hal ini dilandasi fakta bahwa Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar Jepang dalam skema TPP. Keluarnya Amerika Serikat tentu akan mengurangi potensi keuntungan yang didapatkan oleh Jepang dari adanya skema perdagangan bebas. Ini. Dengan posisi Amerika Serikat yang sangat penting sebagai mitra, maka baik partai berkuasa partai Liberal Demokratik (LDP) maupun kelompok kepentingan seperti Keindanren mengharapkan agar Amerika Serikat untuk bergabung kembali dalam TPP pada masa waktu yang akan datang.

***b. Peran Aktif Jepang Dalam Negosiasi *Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP)***

Keluarnya Amerika Serikat dari *Trans-Pacific Partnership* meninggalkan kekosongan kepemimpinan dalam perjanjian perdagangan bebas ini. Selain kekosongan dalam kepemimpinan dari negara *superpower* dunia, juga merupakan sebuah titik balik dimana aktor dagang paling utama dalam TPP justru keluar. Sehingga hal ini dapat melemahkan daya tarik dari aliansi ekonomi ini. Jepang memandang bahwa kekosongan kepemimpinan sebagai kesempatan. Dimana pada akhirnya Jepang memutuskan untuk mengambil alih keaktifan dalam negosiasi yang ditinggal oleh Amerika Serikat dalam TPP. Langkah Jepang yang lebih aktif dilakukan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dari Partai Liberal Demokrat (LDP). Perdana Menteri Shinzo Abe berpendapat bahwa;

*“We have finally come to agreement for free and fair trade, we hope to utilize that agreement framework, unfortunately U.S has declared withdrawal from the TPP since we*

*have come far, Japan must take on leadership role and bring and bring talk forward”* (Cnbc, 2017).

Dalam pernyataan Perdana Menteri Shinzo Abe tersebut dapat ditarik bahwa Jepang dibawah Shinzo Abe berniat mengambil sikap yang lebih aktif dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas TPP. Hal tersebut karena negosiasi perjanjian perdagangan bebas tersebut telah dilakukan dalam waktu yang lama. Sehingga upaya kepemimpinan Jepang dalam *Comprehensive and Progressive Partnership for Trans-Pacific Partnership* juga tidak dapat dilepas dari upaya yang telah dilakukan Jepang dalam upayanya bergabung dalam TPP.

Menjadi lebih aktif dalam TPP tidak dapat dipisahkan dari sejarah Jepang dalam bergabung dengan TPP. Upaya bergabungnya Jepang dalam TPP dimulai sejak masa Perdana Menteri Naoto Kan dari partai Demokrat di tahun 2010. Negosiasi juga dilanjutkan pada masa Perdana Menteri Yoshihiko Noda dari partai yang sama. Pada tahun 2013, Jepang mengalami pergantian partai berkuasa, dimana Partai Liberal Demokrat dibawah Shinzo Abe memenangkan pemilihan umum dan menjadi pemerintahan. Meskipun terjadi pergantian kekuasaan, tidak membuat Jepang mundur dari negosiasi TPP, justru Perdana Menteri Shinzo Abe melanjutkan upaya untuk bergabung dalam TPP. Setelah negosiasi yang dilakukan sepanjang tahun 2013, pada akhirnya Perdana Menteri Shinzo Abe mengumumkan niatan Jepang untuk bergabung dengan TPP. Pada pidatonya Perdana Menteri Shinzo Abe menekankan pada tiga hal yaitu; *Pertama*, TPP penting untuk merevitalisasi ekonomi Jepang; *Kedua*, pemerintah menjamin dan berkomitmen untuk melindungi kepentingan dari sektor pertanian dalam menghadapi liberalisasi pasar; *Ketiga*, bergabungnya Jepang dalam TPP penting untuk memperkuat persekutuan dengan Amerika Serikat dan sekutu lain untuk

menciptakan nilai bersama guna menghasilkan peraturan baru dalam tatanan ekonomi (Davis, 2018, p. 06).

Keputusan Jepang untuk ikut dalam TPP didukung oleh beberapa kelompok kepentingan di Jepang. Diantaranya adalah kelompok bisnis dan birokrat, Terdapat dua jenis pebisnis di Jepang yaitu *gyokai* (*sectoral world*) merupakan kelompok pebisnis yang bergerak di bidang industri dan sektor pertanian dan *zaikai* (*business world*) merupakan organisasi induk dalam kalangan pebisnis komersil yang mana terdiri dari empat perusahaan besar. Disamping itu juga terdapat kelompok pebisnis swasta yang disebut dengan *Keiretsuka*, dimana merupakan salah satu kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam menekan munculnya sebuah pengambilan keputusan.

Salah satu kelompok *zeikai* yang memiliki pengaruh besar adalah *Keidanren*, dimana merupakan salah satu pendonor terbesar bagi Partai Liberal Demokratik (LDP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Sehingga mengakomodasi suara kelompok ini merupakan bagian penting dalam membuat keputusan, baik dalam level domestik maupun internasional. Industri manufaktur Jepang Sementara itu Organisasi industri seperti “*Keidanren*” dan “*Asosiasi Manufaktur Automobil Jepang*” mendesak pemerintah untuk segera menyimpulkan negosiasi. Ketua Industri Teknologi elektronik dan informasi Jepang, Mr. Ryoji Chubachi menekankan bahwa untuk majunya industri yang dipimpinnya dalam menghadapi kompetisi internasional, maka perlu peranan pemerintah untuk segera memiliki perjanjian perdagangan bebas yang menjamin pengurangan tarif serta menjamin hak kekayaan intelektual. Disamping kelompok pebisnis, dalam lingkaran kekuasaan di Jepang juga terdapat kelompok

yang cukup berpengaruh, bahkan kelompok ini terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan (*decision making process*) terutama dalam kebijakan ekonomi. Kelompok ini merupakan birokrat yang terdiri dari 14 posisi menteri yang berada dibawah komando pemerintahan Perdana Menteri Jepang. Diantara posisi tersebut adalah menteri perekonomian Jepang.

Dalam menyikapi kepemimpinan Jepang dan sikap Jepang yang mempertahankan negosiasi *Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), ketua *Keidanren* memuji langkah yang diambil pemerintah Jepang dalam mengambil alih kepemimpinan dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP-11). Langkah Perdana Menteri Shinzo Abe dalam menempatkan Jepang sebagai pemimpin salah satu poros ekonomi global juga di dukung oleh pemain industri domestik. Pada 2018, dari 121 perusahaan yang diambil sebagai contoh, 70% diantaranya berharap bahwa TPP-11 akan membawa dampak positif bagi perekonomian Jepang. Sementara itu 80% diantaranya akan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas tersebut sebagai peluang bisnis. Disamping itu dukungan juga tentu diberikan oleh kelompok birokrat di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, mengingat pucuk pemerintahan Jepang dibawah Shinzo Abe berniat melanjutkan negosiasi.

Paska keluarnya Amerika Serikat, telah dilakukan beberapa negosiasi dalam CPTPP, telah diadakan beberapa pertemuan yang membahas mengenai kelanjutan dan negosiasi perdagangan. Sejak keluarnya Amerika Serikat pada Januari 2017, terdapat beberapa pertemuan yang telah dilakukan sampai akhirnya disepakati perjanjian dagang CPTPP pada akhir 2018. Pada tabel 2.3 dapat dilihat



kronologi waktu negosiasi yang dilakukan setelah keluarnya Amerika Serikat hingga tercapainya kesepakatan baru CPTPP.

<b>Tabel 2.3</b>		
<b>Negosiasi TPP Paska Keluarnya Amerika Serikat</b>		
<b>No.</b>	<b>Tempat dan Tanggal Negosiasi</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Januari 2017	Amerika Serikat keluar dari TPP
2.	02-03 Mei 2017, Ontario, Kanada	Pertemuan menteri-menteri anggota TPP-11
3.	21 Mei 2017, Hanoi, Vietnam	Pertemuan menteri-menteri ditengah KTT APEC, membahas langkah TPP selanjutnya paska keluarnya Amerika Serikat
4.	12-14 Juli 2017, Hakone, Jepang	Pejabat-pejabat senior anggota TPP bertemu untuk meluncurkan komitmen bersama untuk menciptakan pasar yang adil, bebas, progresif
5.	28-30 Agustus 2017, Sydney, Australia	Pertemuan kedua pejabat-pejabat senior untuk membahas mengenai potensi penyusunan perjanjian dagang baru
6.	19-22 September, Tokyo, Jepang	Pertemuan ketiga pejabat-pejabat senior untuk membahas kelanjutan potensi perjanjian baru
7.	30 Oktober-1 November 2017, Maihama, Jepang	Pertemuan keempat pejabat-pejabat senior

		mengenai kelanjutan perjanjian dagang baru
8.	November 2017, Da Nang, Vietnam	Pertemuan kelima pejabat-pejabat senior, menyepakati dasar perjanjian baru TPP yaitu CPTPP
9.	22-23 Januari 2018, Tokyo, Jepang	11 negara anggota menyepakati isi perjanjian final CPTPP
10.	18 Maret 2018, Santiago, Chili	11 negara anggota menandatangani perjanjian CPTPP. Pemberlakuan CPTPP akan mengurangi dan menghilangkan hambatan tarif dan menghilangkan hambatan non-tarif dalam transaksi perdagangan
11.	30 Desember 2018	Penerapan CPTPP oleh enam negara; Australia, Kanada, Meksiko, Jepang, Selandia Baru, Singapura
12.	Januari 2019	Penerapan CPTPP di Vietnam
Sumber : (Timeline of the CPTPP, 2018)		

### c. Strategi Jepang Dalam Mempertahankan Negosiasi CPTPP

Paska keluarnya Amerika Serikat, Jepang mengeluarkan beberapa strategi dalam mempertahankan negosiasi yang ada dalam CPTPP. Adapun strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut;

*Pertama*, upaya Jepang untuk mempertahankan jalannya negosiasi dalam CPTPP serta kelangsungan eksistensi organisasi kerjasama perdagangan bebas regional tersebut adalah dengan berupaya menarik kembali Amerika Serikat ke dalam organisasi. Hal ini dapat dipahami sebagai langkah strategis guna memperkuat organisasi yang telah ada. Sehingga keluarnya Amerika Serikat dari TPP, tidak menyurutkan upaya Jepang untuk kembali menarik Amerika Serikat kembali menjadi anggota. TPP merupakan salah satu perjanjian internasional yang penting bagi pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Hal ini disebabkan karena ekonomi “*Abenomics*” membutuhkan perjanjian dagang ini untuk mengatasi deflasi dan untuk merevitalisasi perekonomian Jepang. Dengan adanya TPP maka memungkinkan untuk terjadinya reformasi struktural dalam ekonomi Jepang atau dengan kata lain merevitalisasi sektor swasta (Takashi, 2018). Dengan posisi penting TPP bagi Jepang maka Perdana Menteri Shinzo Abe berusaha secara maksimal untuk mempertahankan keberlangsungan perjanjian perdagangan bebas ini. Usaha maksimal yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe adalah dengan menemui berbagai pemimpin anggota TPP. Terutama menemui presiden terpilih Donald Trump pada tahun 2016 di Trump Tower, Amerika Serikat. Pertemuan ini diadakan sebelum Amerika Serikat resmi keluar dari perjanjian dagang TPP. Dalam pertemuan tersebut Perdana Menteri Shinzo Abe menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk membujuk Donald Trump agar membiarkan Amerika Serikat tetap bergabung dalam TPP. Selain menemui presiden terpilih Donald Trump, Perdana Menteri Shinzo Abe juga berupaya untuk meyakinkan pemimpin-pemimpin dari negara anggota lain agar berkomitmen pada TPP, diantara pemimpin dunia tersebut

adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden menjabat Amerika Serikat pada saat itu Barack Obama dan juga dengan pemimpin Australia serta Vietnam pada tahun 2017 (Takashi, 2018). Dengan upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa TPP merupakan perjanjian vital bagi Jepang.

Deputi Perdana Menteri Jepang juga percaya bahwa Amerika Serikat akan sadar bahwa hubungan dagang bilateral dengan Jepang hanya membawa keuntungan yang sedikit dibanding hubungan dagang dengan mekanisme TPP. Beberapa pertemuan diadakan dalam rangka mengajak Amerika Serikat untuk tidak meninggalkan TPP pada tahun 2017. Dimana negosiator dari 7 partai berkumpul di Tokyo untuk membuat draft dokumen perjanjian sebelum pertemuan APEC. Jepang masih percaya bahwa TPP-11 (CPTPP) masih terbuka lebar bagi Amerika Serikat untuk bergabung kembali kemudian. Pemerintah Jepang menolak upaya dari negara anggota TPP-11 lain untuk merubah peraturan perjanjian, dimana percaya bahwa hal tersebut akan membuat Amerika Serikat menolak kembali bergabung dengan TPP-11. Seorang pejabat Sekretariat Kabinet Jepang menggaris bawahi bahwa satu-satunya opsi untuk meyakinkan Amerika Serikat adalah untuk tidak merenegosiasi. Hal tersebut merupakan respon dari saran Selandia Baru yang akan menerapkan pengaturan ketat pada bidang *real estate*.

*Kedua*, Jepang memimpin negara-negara anggota untuk menanggukhan ketentuan dalam TPP yang sebelumnya menjadi faktor keberatan Amerika Serikat untuk bergabung dalam TPP. Para pihak sepakat untuk menanggukhan 20

ketentuan, yang terutama dicari oleh Amerika Serikat dan disetujui oleh negara-negara lain dengan imbalan akses ke pasar A.S. Hal ini terutama berlaku di bidang hak kekayaan intelektual (IPR) di mana CPTPP menanggukkan ketentuan mengenai paten untuk penemuan yang berasal dari pabrik; paten untuk penggunaan baru, proses atau metode produk yang sudah ada (disebut *evergreening*); penyesuaian periode paten untuk keterlambatan pemasaran dan persetujuan paten; perlindungan data uji yang tidak diungkapkan untuk obat-obatan kimia dan biologis; periode hak cipta + 70 tahun penulis / pencipta; kewajiban hukum dan peraturan yang aman untuk penyedia layanan internet; pengelakan dan manajemen hak digital; dan perlindungan program enkripsi dan satelit dan sinyal kabel (Charlotte Greenfield, 2018). Disamping itu Motegi, juru runding CPTPP menyambut baik kepentingan dari banyak negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat untuk bergabung dalam CPTPP. Dalam pernyataannya, Motegi menyampaikan poin-poin penting, diantaranya;

- Optimis bahwa AS dan China dapat membuat kemajuan dalam pembicaraan perdagangan mereka;
- Sangat penting bagi Jepang dan AS untuk membuat kerangka kerja bagi pembicaraan perdagangan mereka sendiri, yang harus bebas dan adil;
- Menyadari keinginan AS untuk mengurangi defisit dagangannya dengan Jepang; investasi di A.S. oleh perusahaan-perusahaan Jepang menciptakan sejumlah besar pekerjaan Amerika Serikat;
- Motegi dalam komentar yang relevan dengan China, dia mengatakan Jepang akan terus bekerja sama dengan AS dan Eropa dalam menangani masalah kekayaan intelektual (Miller, 2018).

### BAB III

#### ANALISIS *BUREAUCRATIC MODEL* DALAM KEPUTUSAN JEPANG MEMPERTAHANKAN NEGOSIASI CPTPP 2017-2018

Bab ini membahas mengenai analisis sikap Jepang yang tetap mempertahankan negosiasi “*Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership*” (CPTPP) meski Amerika Serikat sebagai pemimpin dan mitra dagang utama keluar dari perjanjian pada tahun 2017. Dalam rangka menjabarkan analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan *Bureaucratic Model* sebagai alat analisis. Dalam teori *Bureaucratic Model* terdapat dua hal yang menjadi komponen analisis utama. Dua komponen dalam pendekatan *Bureaucratic Model* tersebut dijadikan sub-bab dalam bab ini. Adapun dua hal tersebut adalah, *Pertama* Identifikasi Model Birokratik, dalam tahap ini menjabarkan mengenai tujuh hal yang terjadi dalam pembentukan sebuah keputusan yaitu *pemain-pemain dalam posisi; prioritas, persepsi dan isu; kepentingan, pertarungan dan kekuatan; masalah-masalah; saluran tindakan; tindakan sebagai politik; aliran sebagai hasil*. Pada implementasinya, identifikasi dilakukan dalam kasus Jepang mempertahankan CPTPP paska keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian perdagangan bebas tersebut; *Kedua* Analisis Model Birokratik, terdapat tiga komponen analisis utama setelah identifikasi yaitu, *Aksi dan Niatan; Posisi (where you stand depend on where you sit); Chief dan Indians*.

### 3.1 Identifikasi Model Birokratik

Pembahasan sebelumnya menerangkan mengenai konsep *bureaucratic model* sebagai alat analisis keputusan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP. Dari penjelasan sebelumnya juga diperlukan identifikasi terlebih dahulu mengenai tujuh hal sebelum membahas mengenai analisis utama. Identifikasi tujuh hal ini disebut oleh Alisson sebagai “*organizing concept*”, dengan demikian bab ini membahas identifikasi ketujuh komponen tersebut. *Pertama*, menjelaskan mengenai posisi pemain dalam pengambilan kebijakan; *Kedua*, menjelaskan tentang prioritas terbatas, persepsi dan isu-isu dari pemain-pemain yang terlibat; *Ketiga*, menerangkan kepentingan, pertarungan serta kekuatan yang dimiliki oleh pemain-pemain; *Keempat*, masalah-masalah yang dihadapi oleh pemain-pemain; *Kelima*, saluran yang dipilih pemain untuk bertindak; *Keenam*, tindakan politik yang diambil oleh pemain-pemain yang terlibat dalam pengambilan keputusan; dan terakhir *Ketujuh*, arus sebagai hasil, yaitu hasil keluaran dari kompromi pemain-pemain yang terlibat.

#### 3.1.1 Pemain-pemain dalam posisi.

Menurut Alisson, pemain-pemain yang dimaksud adalah individu, bukan negara atau konglomerat. Selanjutnya Alisson menerangkan bahwa pemain-pemain merupakan orang yang mengisi jabatan dalam pemerintahan;

*“Groups of these players constitute the agent for particular government decisions and actions. Players are men in jobs.”* (Allison, 1969).

Dalam penjelasannya, Alisson juga membagi pemain berdasarkan tiga kategori, yaitu *Chief*, *Staff* dan *Indians*, juga mencontohkan siapa saja pemain yang termasuk dalam ketiga kategori tersebut;

*“U.S. government the players include “Chiefs”:the President, Secretaries of State, Defense, and Treasury, Director of the CIA, Joint Chiefs of Staff, and, since 1961, the Special Assistant for National Security Affairs ; 80 “Staffers” : the immediate Staff of each Chief; “Indians”: the political appointees and permanent government officials within each of the departments and agencies ; and “Ad Hoc Players” : actors in the wider government game (especially Congressional Influentials”), members of the press, spokesmen for important interest groups (especially the “bipartisan foreign policy establishment? in and out of Congress), and surrogates for each of these groups. Other members of the Congress, press, interest groups, and public form concentric circles around” (Allison, 1969, p. 709)*

Dengan kutipan di atas, maka telah dicontohkan siapa saja yang tergolong dalam tiga jenis pemain yang terlibat dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri. Keputusan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP juga ditentukan oleh pemain-pemain yang ada. Dalam konteks ini maka pemain-pemain tersebut adalah sebagai berikut; *Pertama, Chief* merupakan pemain yang memiliki posisi pengambilan keputusan tertinggi baik dalam pemerintahan seperti Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, ataupun menteri-menteri yang mengetuai satu kementerian seperti Taro Aso, yang terkait dengan masalah ekonomi, perdagangan dan hubungan luar negeri. Pada tabel 1 dapat dilihat *Chief* yang terlibat; *Kedua, Staffers*, yaitu *Staff* yang dimiliki oleh masing-masing *Chief*, baik itu perdana menteri maupun menteri-menteri, pada tabel 2 dapat dilihat *Staffers* yang terlibat dalam pengambilan kebijakan; *Ketiga, Indians* merupakan jabatan politik yang merupakan posisi mewakili pemerintahan ataupun departemen resmi negara. Pada tabel 3 dapat dilihat *Indians* yang terlibat dalam pengambilan kebijakan.



<b>Tabel 3.1</b>		
<b>Pemain-pemain <i>Chief</i></b>		
<b>No.</b>	<b>Chief</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Shinzo Abe (Perdana Menteri)	Perdana menteri
2.	Taro Aso (Wakil PM, Menteri Keuangan)	Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan
3.	Taro Kono (Menteri Luar Negeri)	Menteri Luar Negeri
4.	Hiroshige (Menteri Ekonomi, dan Perindustrian) Shiko	Menteri Ekonomi dan Perindustrian
5.	Yoshihide (Sekretaris Kabinet) Suga	Sekretaris Kabinet
6.	Toshimitsu Motegi (Menteri Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, Menteri TPP dan Negosiasi Perdagangan Jepang-AS)	Menteri Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, Menteri Negosiasi TPP dan Negosiasi Perdagangan AS-Jepang
Sumber : (Kantei.go.id, 2018)		

<b>Tabel 3.2</b>		
<b>Pemain-pemain <i>Staffers</i></b>		
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Yamagami Shingo	Direktur Jenderal Biro Hubungan Ekonomi
2.	Okochi Akihiro	Direktur Biro Kerjasama Ekonomi
3.	Katahira Satoshi	Direktur Divisi Perjanjian Ekonomi
4.	Nanazawa Jun	Asisten Eksekutif Menteri Luar Negeri Jepang
Sumber : (Mofa Japan, 2019)		

<b>Tabel 3.3</b>		
<b>Pemain-pemain <i>Indians</i></b>		
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Takehiro Kagawa	Duta Besar untuk Hubungan Ekonomi Internasional
2.	Kazuyoshi Umemoto	Ketua Negosiator Jepang untuk TPP, Duta Besar untuk Hubungan Ekonomi Internasional
Sumber : (Miyazaki, 2018)		

<b>Tabel 3.4</b>		
<b>Pemain-pemain Kelompok Kepentingan</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama Pemain</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Keidanren	Federasi Pebisnis Jepang
2.	Nokyo	Organisasi Koperasi Pertanian Jepang
3.	Asosiasi Petani Susu dan Daging Babi	-
4.	Asosiasi Manufaktur Mobil	-
5.	Asosiasi Industri Elektornik, Teknologi dan Informasi	-
Sumber : (Davis, 2018, pp. 6-19)		

Disamping tiga jenis pemain yang terlibat juga terdapat pemain lain yang berada di luar pemerintahan. Hal ini disebut oleh Alisson sebagai “*interest group*” atau kelompok kepentingan. Dalam penentuan kebijakan Jepang mempertahankan negosiasi CPTPP. Pada tabel 4 merupakan pemain-pemain yang tergabung dalam kelompok kepentingan.

Dalam tabel-tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat empat jenis pemain yang terlibat dalam pembuatan keputusan Jepang tetap mempertahankan TPP. Empat jenis kelompok tersebut adalah; *Chiefs*, *Staffs*, *Indians* dan *Kelompok Kepentingan*. *Pertama*, *Chiefs*, dalam kategori ini terdapat enam petinggi eksekutif dalam kabinet koalisi Partai Demokratik Liberal dan Partai Komeito. Keenam petinggi eksekutif tersebut berpartisipasi langsung dalam negosiasi TPP, bahkan terdapat menteri yang focus dalam mengurus masalah negosiasi TPP. *Kedua*, *Staffs*, dalam golongan ini merupakan asisten dari kementerian terkait TPP, sehingga juga terlibat dalam pembahasan negosiasi TPP. *Ketiga*, *Indians*, merupakan utusan langsung Jepang yang langsung terlibat dalam TPP. *Keempat*, kelompok kepentingan yang terdiri dari beberapa asosiasi. Dalam TPP terdapat pengaturan masalah-masalah seperti perdagangan dalam bidang industri teknologi dan pertanian. Sehingga memasukan kelompok kepentingan dalam tabel 3.4 tepat karena mewakili suara-suara kelompok yang kepentingannya akan diatur dalam TPP. Pemilihan terhadap keempat jenis pemain-pemain yang terdapat dalam empat tabel didasarkan pada keterlibatan langsung pihak-pihak tersebut dalam TPP, atau merupakan pihak yang secara langsung terdampak dalam TPP seperti kelompok kepentingan.

Dalam hal ini juga terdapat kepentingan-kepentingan yang dianut oleh keempat pemain. *Pertama Chief*, pada hal ini merupakan *Shinzo Abe, Taro Aso, Taro Kono, Hiroshige Shiko, Yoshihide Yuga, Toshimitsu Motegi*. Dalam hal ini kepentingan Chief adalah untuk melindungi kepentingan nasional Jepang, serta merumuskan kebijakan politik ekonomi yang menguntungkan bagi Jepang (Mulgan, 2016, p. 01). *Kedua, Staff* yang merupakan sekretaris daripada *Chieff, Yamagami Shingo, Okochi Akhihiro, Katahira Satoshi, Nanazawa Jun* (lihat tabel 3.2). Dalam hal ini merupakan menteri-menteri Shinzo Abe. Staff juga memiliki kepentingan yang sama sesuai dengan *Chieff*, hal ini mengacu pada sistem politik demokrasi parlementer Jepang yang bersifat sentralistik. Sehingga memperjuangkan kepentingan yang sama yaitu kepentingan nasional Jepang. *Ketiga, Indians* adalah utusan resmi Jepang yang menangani perundingan TPP *Takehiro Kagawa, Kazuyoshi Umemoto* (lihat tabel 3.3). Pada hal ini, utusan resmi Jepang dalam negosiasi juga memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan nasional Jepang. Serta mengikuti arahan dari pemerintah pusat. *Keempat kelompok Kepentingan* adalah *Keindanren, Nokyō, Asosiasi Industri Elektornik, Teknologi dan Informasi, Asosiasi Manufaktur Mobil, Asosiasi Petani Susu dan Daging Babi*. Dalam hal ini terdapat dua pemain yang memiliki suara signifikan terhadap isu negosiasi CPTPP yaitu *Keindanren* dan *Nokyō*. Dalam hal ini kepentingan *Keindanren* sebagai asosiasi pengusaha Jepang adalah mendorong kemajuan ekonomi dan usaha Jepang, dalam hal ini sektor swasta (Keindanren, n.d.). Sementara kepentingan *Nokyō* sebagai asosiasi kelompok petani Jepang adalah untuk melindungi produk pertanian Jepang dari pasar bebas (Harner, 2011).

Keempat pemain diatas memiliki pola interaksi yang dinamis, meskipun demikian terdapat dua jenis interaksi yang terjadi. *Pertama*, interaksi *Chief*, *Staff* dan *Indians* dalam hal ini mengacu sistem politik demokrasi parlementer Jepang, maka ketiga pemain diatas memiliki kordinasi yang searah dan tersentralistik (Kobayashi, 1988, p. 16). Dalam hal ini Perdana Menteri Shinzo Abe dapat menginstruksikan perintah kepada menteri-menteri (*Staff*), utusan resmi Jepang (*Indians*). Sementara itu menteri-menteri dan utusan resmi dapat berkonsultasi dengan Perdana Menteri. *Kedua*, interaksi kelompok kepentingan *Keindanren* dan *Nokyo* dengan *Chief*, *Staff* dan *Indians*. Dalam hal ini kelompok kepentingan dapat menyalurkan suaranya kepada *Chief* baik itu perdana menteri maupun menteri, serta sekretaris dari para menteri. Diadakannya pertemuan, konsultasi seperti yang dilakukan oleh *Keindanren* dengan Perdana Menteri merupakan contoh simana interaksi tersebut terjadi. Sementara itu terhadap *Indians*, kelompok langsung tidak dapat melakukan kontak secara langsung, mengingat *Indians* hanya mengikuti perintah dari *Chieff* (Kantei.go.id, 2017).

### **3.1.2 Prioritas, Persepsi dan Isu.**

Berdasarkan penjelasan Alisson, posisi pemain-pemain yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam membentuk prioritas, persepsi dan isu dipengaruhi oleh orientasi organisasi dan departemen yang diduduki. Dalam penjelasan sebelumnya terdapat empat jenis pemain yang terlibat yaitu *Chief*, *Staffers*, *Indians* dan Kelompok kepentingan (Allison, 1969). Masing-masing dari berkemungkinan besar memiliki persepsi, prioritas isu masing-masing.

Dalam pihak *Chief, Staffers* dan *Indians* mengikuti perintah Perdana Menteri Shinzo Abe. Hal ini disebabkan sistem politik Jepang yang sangat sentralistik dalam figur kepemimpinan dari partai berkuasa yaitu Partai Liberal Demokratik (LDP) dibawah kepemimpinan Shinzo Abe. Sehingga tidak terdapat dinamika yang besar dalam perbedaan prioritas. Perdana Menteri Shinzo Abe sangat berperan penting dalam keputusan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP. Dalam pidato dalam pembentangan kebijakan di parlemen “193<sup>rd</sup> Session of the Diet 2017” pada 20 Januari. Shinzo Abe menerangkan prioritas kebijakannya yang menyebut “ Aliansi Amerika Serikat-Jepang” sebagai hal pertama yang diutarakan dalam sesi pembentangan kebijakan tersebut.

*“The Japan-U.S. Alliance has, is, and will continue to be, the cornerstone of Japan’s diplomacy and security policies. This is an unchanging principle. I intend to travel to the United States at the earliest possible opportunity to meet with President Trump to further strengthen the bonds of our alliance”* (Kantei.go.id, 2017).

Dalam sesi tersebut, Shinzo Abe juga menekankan pada pentingnya adanya sistem ekonomi yang adil di abad 21. Dengan demikian TPP merupakan salah satu cara untuk mencapainya, bahkan Shinzo Abe mengatakan ini sebagai “*cornerstone of future economic partnerships*”.

*“...We will, as the standard-bearers of free trade, build a 21st century economic system based on fair rules.*

*The TPP Agreement sets the standard for this, and will be a cornerstone of future economic partnerships”* (Kantei.go.id, 2017).

Aliansi strategis dengan Amerika Serikat serta penguatan kerjasama ekonomi menunjukkan bahwa terdapat prioritas kuat dari Shinzo Abe dalam kebijakan ekonomi dan strategis keamanan. Prioritas Shinzo Abe juga pada perkembangan ekonomi domestik, dimana pada tahun 2017 mendapat kritik tajam terhadap kinerja ekonomi Shinzo Abe dalam bidang ekonomi yang dipangang

kurang efektif (Andri, 2017). Pergantian kabinet pun dilakukan dalam rangka memperbaiki ekonomi. Perdana Menteri Shinzo Abe juga menyatakan bahwa;

*“Perekonomian akan menjadi prioritas kami. Sebab kami ingin agar tren deflasi segera berakhir. Menteri Ekonomi Toshimitsu Motegi akan mengawasi upaya reformasi struktural kami”* (Andri, 2017).

Dengan demikian diketahui bahwa prioritas Shinzo Abe adalah aliansi strategis dengan Amerika Serikat dan perbaikan kondisi ekonomi Jepang. Adanya prioritas dalam dua hal tersebut dipengaruhi oleh adanya persepsi yang dipegang oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Secara historis, Jepang dibawah LDP memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. Kedekatan Amerika Serikat dan partai Liberal Demokratik (LDP) di dorong kekhawatiran akan meningkatnya pengaruh kaum kiri pada pemilihan umum di Jepang yaitu Partai Sosial Jepang dan Partai Komunis Jepang. Sehingga sepanjang pemilihan umum Jepang dari tahun 1960-an hingga 1970-an, partai Liberal Demokratik secara konsisten mendapat bantuan dari Amerika Serikat dalam bidang pendanaan (LDP) (Weiner, 1994). Dengan hubungan historis yang dekat dengan Amerika Serikat, tentu membuat Perdana Menteri Shinzo Abe ingin kembali mengeratkan aliansi dua antara Jepang dan Amerika Serikat. Disamping itu prioritas lain adalah perbaikan ekonomi Jepang, dalam studi kasus penelitian ini diketahui bahwa perdagangan bebas digunakan sebagai mekanisme untuk memperbaiki kondisi ekonomi Jepang. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kepemimpinan Shinzo Abe. Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada 2012, Shinzo Abe telah menjanjikan perbaikan ekonomi dengan strategi “*Abenomics*”. Penggunaan strategi ekonomi tersebut telah dinilai berhasil menangani beberapa masalah ekonomi Jepang seperti misal pasar bursa saham Jepang mengungguli performa

Uni Eropa dalam hal “*total dollar returns*” (Tasker, 2018). Dengan demikian diketahui bahwa prioritas dalam peningkatan performa ekonomi dipengaruhi oleh sosok Shinzo Abe dan partai Liberal Demokratik (LDP). Sementara itu dalam “*Issues*” (isu) maka seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya adalah adanya meluasnya pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik melalui beberapa program geopolitik, geostrategis dan geoekonomi seperti program “*One Belt One Road*” serta manuver militer Tiongkok di laut Tiongkok Selatan. Yang mana hal-hal tersebut meliputi sektor ekonomi dan keamanan Tiongkok di kawasan. Hal-hal tersebut juga menempatkan posisi Jepang semakin terpojok dalam politik Internasional. Maka tidak salah apabila Jepang dibawah Shinzo Abe pada akhirnya memilih untuk memprioritaskan kebijakan terutama TPP untuk sektor ekonomi dan strategis keamanan.

Disamping itu, pemain yang terlibat lain adalah *kelompok kepentingan*, dalam hal ini prioritas utama dari masing-masing kelompok kepentingan adalah memperjuangkan kepentingan kelompok masing-masing. Dengan demikian terdapat perbedaan prioritas antara kelompok satu dengan lainnya, sesuai dengan kepentingan bisnis masing-masing. Adapun persepsi juga terdapat beragam antar kelompok kepentingan, Keidanren sebagai asosiasi pengusaha Jepang menilai adanya TPP-11 akan meningkatkan dan menguntungkan sektor perdagangan Jepang. Keidanren memprediksikan dengan adanya TPP, pertumbuhan ekonomi Jepang meningkat 2.7%, serta ekspor akan bertambah sekitar USD 23.2 milyar (Keidanren, 2017).

*Nokyo* sebagai asosiasi pertanian menilai TPP-11 hanya akan merugikan Jepang, karena adanya TPP akan mengizinkan adanya arus masuk produk



pertanian luar yang tentu lebih murah dari hasil petani Jepang. Dalam hal ini TPP akan berdampak pada naiknya impor sektor pertanian Jepang, diantaranya daging sapi meningkat 31% dengan nilai USD 1 milyar per tahun, beras meningkat 111%, USD 570 per tahun, gandum 14% dengan nilai USD340 juta per tahun, mentega naik 52%, susu krim bubuk 41%, keju 5%, daging babi 3% (Korves, 2014).

Adapun isu-isu yang muncul berkaitan dengan kepentingan dan tujuan masing-masing dari organisasi atau asosiasi. Kelompok pertanian menganggap bahwa TPP akan membawa kerugian bagi mereka. Sementara kelompok pengusaha terutama industri automobile menganggap TPP justru membawa keuntungan. Perbedaan sikap yang ada merujuk pada sektor yang mereka tekuni, dimana sektor pertanian lebih terimbas secara signifikan. Sementara sektor industri dan teknologi justru dinilai akan terdongrak dengan besar apabila TPP-11 disepakati.

### **3.1.3 Kepentingan, Pertaruhan dan Kekuatan**

Setiap pemain memiliki kepentingan, pertaruhan, kedua hal tersebut ditentukan oleh “*power*” atau kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing pemain. Sehingga kekuatan pemain menentukan pengaruh yang akan diberikan terhadap pengambilan keputusan (Allison, 1969).

Dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat kepentingan-kepentingan dalam pengambilan keputusan. Adapun dua kepentingan bersama adalah, yaitu kepentingan dari a.) (*Chiefs, Staffs* dan *Indians*) dan b.) *kelompok kepentingan*.

*Pertama, Kepentingan, Pertaruhan dan Kekuatan bagi Chief, Staff dan Indians* adalah sama, karena mereka berada dalam satu garis kordinasi. Terdapat dua kepentingan yang mendorong Jepang tetap mempertahankan negosiasi CPTPP. a.) ekonomi atau keuntungan bagi perekonomian Jepang, Dengan bergabung dengan CTPP maka diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang, dimana Produk Domestik Bruto (PDB) diprediksikan akan meningkat sekitar 2% pada 2025. Hal ini disebabkan karena perdagangann akan memungkinkan negara-negara mengalokasikan sumber daya secara efisien dengan menggunakan skema keuntungan komparatif. Semisal industri auto Jepang akan mendapatkan nilai tambah sekitar USD 21.5 milyar dan mendorong percepatan sekitar 24% nilai ekspor dengan angka 500 juta unit pada ekspor di tahun 2015 (Kwoon, 2018).

b.) *strategis*, CPTPP digunakan sebagai instrumen politik luar negeri Jepang untuk melakukan penyeimbangan terhadap pengaruh Tiongkok di kawasan. Seperti yang diketahui bahwa Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir meluncurkan mega proyek “*One Belt One Road*” (OBOR) dimana menghubungkan benua-benua di dunia, termasuk Asia, Afrika dan Eropa. Langkah tersebut di ikuti dengan adanya pemberian kredit dan penanaman modal di negara-negara yang sepakat dengan proyek *One Belt One Road*. Jepang tentu saja melihat hal ini sebagai sebuah ancaman. Oleh karena itu sejak masa Perdana Menteri Noda, rencana bergabungnya Jepang ditujukan untuk dua dimensi, yaitu memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan sebagai respon terhadap meluasnya pengaruh Tiongkok di kawasan (Sakuyama, 2015, p. 192).

Disamping kepentingan, juga terdapat pertaruhan dan kekuatan, dalam hal ini *Chiefs, Staffs* dan *Indians* sebagai satu garis kordinasi mempertaruhkan beberapa hal. Diantaranya rentan diserang oleh kelompok oposisi baik partai Demokrat (DP) maupun partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDP) di palemen. Serangan terhadap koalisi LDP terkait TPP pernah dilakukan oleh Partai Demokrat (DP) pimpinan Muratha Renho dalam parlemen Jepang. Dimana melakukan protes pada pembahasan TPP, juga mengajukan mosi tidak percaya terhadap menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan “Yamamoto Yuji” (McClean, 2016). Disamping itu apabila terdapat beberapa kelompok yang tidak berpuas hati seperti partai CDC yang menyuarakan kepentingan kelompok petani, juga mungkin akan berdampak pada sisi elektoral LDP. Meskipun demikian, pemerintahan koalisi LDP-Komeito dibawah Shinzo Abe masih memiliki kekuatan yang besar di parlemen dengan memegang kursi mayoritas “232 kursi” berbanding dengan oposisi yang hanya menduduki “133” kursi dalam parlemen. Dengan memegang suara mayoritas maka akan mudah bagi koalisi pimpinan LDP untuk meloloskan sebuah rancangan undang-undang.

*Kedua*, Sementara itu terdapat kepentingan, pertaruhan dan kekuatan bagi kelompok kepentingan yaitu pebisnis. Kelompok-kelompok kepentingan memaksimalkan kepentingan sesuai dengan bisnis yang mereka kerjakan. Diantara beberapa kelompok kepentingan yang terlibat adalah *Keidanren* yang menilai akan mendapat keuntungan besar dari mekanisme perdagangan yang disepakati dalam CPTPP. Nilai ekspor pertumbuhan ekonomi Jepang meningkat 2.7%, serta ekspor akan bertambah sekitar USD 23.2 milyar, dimana mayoritas nilai ekspor dalam bidang industri yang mana sektor yang dikuasai Keindanren

(Keindanren, 2017). Adanya keuntungan besar tentu berdampak pada donasi yang diberikan pada partai berkuasa.

Secara historis Keindanren merupakan salah satu donor terbesar bagi partai Liberal Demokratik (LDP). Keindanren memberikan donor kepada partai Liberal Demokratik (LDP) selama 38 tahun, sampai akhirnya berhenti pada tahun 1994, setahun paska kekalahan partai Liberal Demokratik (LDP) pada pemilihan umum. Namun sejak partai Liberal Demokratik (LDP) berkuasa kembali maka Keindanren kembali memerikan donasi (Nakamura, 2003). Sampai pada tahun 2018, Keindanren juga memiliki pengaruh yang besar terhadap partai Liberal Demokratik (LDP) pimpinan Shinzo Abe. Pengaruh tersebut juga digunakan untuk memberikan beberapa pengaruh dalam pembuatan kebijakan (Asashi Shimbun, 2018). Dengan adanya hubungan finansial ini maka Keindanren memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam mempengaruhi keputusan pemerintah.

Disamping Keindanren terdapat kelompok lain yang menilai CPTPP akan berdampak positif bagi tumbuhnya bisnis mereka. Sementara itu *Nokyo* atau asosiasi pertanian Jepang mengkritik tidak setuju dengan negosiasi TPP, karena dianggap dapat mengancam sektor pertanian Jepang. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk menolak liberalisasi di lima bidang yaitu; beras, gandum, daging sapi, produk susu dan gula. *Nokyo* bersikukuh agar kelima komoditas tersebut diperjuangkan dalam negosiasi TPP. Apabila tidak terdapat regulasi yang mengatur maka akan merugikan dalam sektor tersebut seperti daging sapi 31% dengan nilai USD 1 milyar per tahun, beras meningkat 111%, daging babi 3% (Korves, 2014). (Davis, Japan: Interest Group Politics, Foreign Policy Linkages,, 2017, p. 18). Masuknya jumlah impor yang sangat besar tentu berdampak pada

produk lokal pertanian Jepang. Sementara itu asosiasi produsen mobil dan alat teknologi diuntungkan dalam hal ini dan setuju dengan negosiasi lanjutan TPP.

Dengan adanya dua kepentingan berbeda dalam “*kelompok kepentingan*” maka juga dapat diketahui bahwa terdapat kelompok yang mendukung maupun menolak negosiasi lanjutan TPP paska keluarnya Jepang. Meskipun demikian terdapat dua pertarungan yang dapat terjadi baik kepada kelompok yang menolak maupun mendukung. Bagi kelompok mendukung tentu memiliki kerugian/pertaruhan yang dapat diminimalisir, hal ini diketahui bahwa kemungkinan besar negosiasi dan ratifikasi tetap dilanjutkan mengingat besarnya suara koalisi pimpinan Shinzo Abe di parlemen. Sementara itu pertarungan bagi kelompok yang menolak tentu dapat merusak hubungan baik dengan partai berkuasa. Dengan demikian dapat membuka celah suara kelompok kepentingan seperti *Nokyo* tidak diakomodasi oleh pemerintah. Disamping pertarungan, kekuatan yang dimiliki oleh kelompok kepentingan cukup beragam, seperti *Keindanren* yang merupakan donor bagi partai berkuasa LDP. Sehingga kepentingan juga perlu diakomodasi pemerintah. Kelompok pertanian *Nokyo* juga memiliki pengaruh yang cukup besar, mengingat kelompok ini merupakan basis dari pemilih kalangan petani, yang juga merupakan segemen penting bagi LDP.

#### **3.1.4 Masalah-masalah**

Masalah-masalah strategis yang dihadapi tidak hanya diselesaikan dengan pertimbangan dengan masalah itu sendiri. Melainkan juga dipengaruhi oleh adanya “*deadline, events, demands decision of busy players*”. Dengan demikian pemain-pemain diharuskan mengambil keputusan yang cepat. (Allison, 1969).

Adapun masalah-masalah yang mendorong adanya pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. *Pertama*, dalam penelitian ini, *Chief, Staffers, Indians* dibawah pimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe dihadapkan pada masalah bahwa isu perundingan Trans-Pacific Partnership telah dirundingkan dalam waktu yang lama. Diketahui bahwa perundingan mengenai TPP-12 telah dimulai sejak tahun 2013 hingga 2017. Durasi negosiasi yang cukup lama selain menguras energi baik dalam domestik Jepang maupun internasional, juga dibutuhkan agar segera diselesaikan dengan cepat guna mendorong perbaikan ekonomi Jepang yang mengalami kemunduran. Peforma “*Abenomics*” yang dinilai kurang efektif juga berpengaruh pada elektoral LDP, diamana penerimaan terhadap kepemimpinan LDP hanya sebesar 35% pada 2017 (Japan Times, 2017). Angka tersebut apabila tidak ditanggapi dengan serius maka dapat berpotensi mengganggu suara koalisi LDP-Komeito pada pemilihan umum selanjutnya. Dengan demikian masalah yang dihadapi yaitu perekonomian Jepang yang dinilai melambat dan sisi elektoral LDP.

*Kedua*, masalah perkembangan pengaruh Tiongkok yang semakin meluas melalui program “One Belt One Road” di kawasan tentu mengkhawatirkan Jepang yang juga sebagai salah satu negara “*middle-power*” di Asia Pasifik. Seiring dengan adanya hal tersebut maka mendorong Jepang untuk cepat dalam melakukan tindakan aktif dalam negosiasi TPP paska keluarnya Amerika Serikat. *Ketiga*, disamping itu kelompok kepentingan seperti *Keindanren* menghadapi masalah yaitu, apabila tidak dilanjutkan TPP maka akan menghambat perluasan bisnis perusahaan-perusahaan Jepang. Dengan demikian maka akan merugikan perekonomian Jepang terutama yang bekerja dalam sektor industri.

### 3.1.5 Saluran Tindakan

Proses terciptanya sebuah keputusan tidak datang secara tiba-tiba melainkan melalui aksi tindakan (*action-channels*). Saluran tindakan mengatur cara untuk mencapai suatu tindakan terkait dengan isu yang terkait. Dalam hal ini juga menyaring pemain-pemain utama, menentukan alasan untuk ikut dalam permainan dan mendistribusikan keuntungan dan kerugian bagi setiap permainan. Terdapat proses konsultasi antara *Indians* terhadap *Chief*, *Staff* serta *Kelompok Kepentingan* terhadap *Chieff* dan *Staff* sebelum memutuskan sesuatu (Allison, 1969).

*Pertama*, dalam hal ini merupakan konsultasi *Chieff*, *Staff* dengan *Indians*. Dalam hal ini konsultasi dapat dilihat dengan Kazuyoshi Umemoto (ketua negosiator TPP) sebagai *Indians* terhadap Shinzo Abe sebagai *Chief*. Pada 2017 paska keluarnya Amerika Serikat, Kayuzuyoshi mengadakan konsultasi terhadap Shinzo Abe, dimana dalam laporan itu menyatakan bahwa tanpa Amerika Serikat, TPP-11 akan tetap mencapai tujuan bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa Jepang tetap ingin bertahan dalam negosiasi TPP (Motoko, 2017). Selain dalam parlemen Jepang, anggota-anggota oposisi juga mendorong adanya perlindungan terhadap produk pertanian. Dengan demikian pemerintah bersama oposisi dalam parlemen menyetujui bersama legislasi perlindungan produk pertanian, hal ini untuk mengantisipasi arus bebas dalam TPP (Japan Times, 2018).

*Kedua*, dalam hal ini terdapat konsultasi antara *Chiefs* diantaranya Perdana Menteri Shinzo Abe dan menteri-menterinya dengan kelompok kepentingan. Beberapa konsultasi dilakukan seperti yang terjadi pada 23 Oktober 2017, antara Perdana Menteri Jepang dan organisasi ekonomi. Pada pertemuan ini

Organisasi Ekonomi memberikan proposal dalam negosiasi TPP (Kantei.go.id, 2017). Disamping itu *Keindanren* sebagai asosiasi pengusaha Jepang yang mendorong Jepang untuk tetap bertahan dalam negosiasi TPP paska keluarnya Amerika Serikat juga mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Abe Shinzo Abe pada 2018. Bahkan ketua Keindanren yaitu Sadayuki Sakakibara menekan Perdana Menteri Shinzo Abe secara personal agar merealisasikan TPP (George, 2017). Dalam pertemuan tersebut Perdana Menteri Shinzo Abe menekankan pada komitmen Jepang terhadap CPTPP (Kantei.go.id, 2018).

### **3.1.6 Tindakan sebagai Politik**

Keputusan pemerintah diputuskan melalui mekanisme politik “*Rather the context of shared power but separate judgments concerning important choices, determines that politics is the mechanism of choice*” (Allison, 1969). Sikap Jepang mengambil keputusan untuk bertahan dan menjadi aktif dalam mendorong negosiasi dalam CPTPP merupakan hasil dari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

*Pertama*, prioritas dan kepentingan. Dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa terdapat prioritas, kepentingan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Jepang. Diantaranya mundurnya perekonomian Jepang, dan menguatnya pengaruh Tiongkok di kawasan. Sehingga dengan melanjutkan negosiasi TPP, maka diharapkan dapat menguatkan kembali posisi Jepang dalam bidang tersebut. *Kedua*, kecilnya resistensi dari kelompok kepentingan. Sementara itu, hanya terdapat pihak yang sedikit dalam berseberangan, yaitu kelompok oposisi seperti partai Demokrat dan Partai Demokratik Konstitusional Jepang,



serta kelompok kepentingan seperti Nokyo. Namun dari pertimbangan prioritas, kepentingan serta urgensi dari masalah yang dihadapi hanya dirasakan oleh segelintir pihak seperti misalnya *Nokyo* yang khawatir akan produk pertaniannya terancam. Sementara itu di sisi lain terdapat prioritas, kepentingan serta urgensi masalah yang lebih penting, yaitu yang telah dijelaskan sebelumnya berupa pertimbangan strategis keamanan kawaan dan kondisi ekonomi nasional. Maka dipilihlah melanjutkan TPP-11 sebagai upaya untuk memperbaiki ekonomi, menyeimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan dan mempengaruhi efek elektoral pada partai koalisi. Meskipun demikian kepentingan kelompok pertanian tetap diakomodasi oleh Jepang. Bahkan Perdana Menteri Shinzo Abe berjanji untuk melindungi sektor pertanian, terutama kelima bahan yaitu beras, gandum, daging sapi, produk susu dan gula. Hal ini mempertegas komitmen serupa yang dibuat oleh Shinzo Abe pada tahun 2013, mengenai perlindungan terhadap sektor pertanian dalam negosiasi TPP (Euro2Day, 2013).

### **3.1.7 Hasil (*Streams of Outcome*)**

Keputusan atau tindakan penting pemerintah muncul sebagai kolase yang terdiri dari tindakan individu, hasil pertandingan kecil dan utama, dan pelanggaran. Hasil yang tidak pernah dapat dipilih oleh aktor dan tidak akan pernah muncul dari tawar-menawar dalam satu pertandingan atas masalah ini dibuat sepotong demi sepotong (Allison, 1969). Keputusan Jepang untuk tetap bertahan dalam TPP paska keluarnya Amerika Serikat merupakan hasil perundingan, pertimbangan baik dari pihak *Chief, Staffers, Indians* dan *kelompok kepentingan*. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa *Chief, Staff dan Indians* memiliki

garis kordinasi yang sama, hal ini mengingat sistem politik Jepang yang bersifat sentralistik.

Dengan demikian prioritas, kepentingan, serta masalah-masalah yang dihadapi oleh ketiga pemain tersebut sama. Dimana menempatkan prioritas strategis dan ekonomi ditengah kemunduran ekonomi dan meluasnya pengaruh Tiongkok di kawasan sebagai hal yang perlu ditanggulani terlebih dahulu. Peran Perdana Menteri Shinzo Abe sebagai ketua koalisi partai Demokratik Liberal (LDP)-*Komeito* dan sebagai seorang kepala pemerintahan Jepang (Perdana Menteri) sangat terlihat dengan jelas. Sementara itu kecilnya pihak disebabkan karena prioritas, kepentingan dan masalah-masalah serta kekuatan mereka tidak lebih mendesak dan kuat seperti halnya *Chiefs, Staffs* dan *Indians*.

### **3.2 Analisis Model Birokratik**

Terdapat tiga komponen dalam analisis model birokratik. Tiga komponen tersebut adalah aksi dan niatan, posisi pemain (*where you stand depend on where you sit*), *Chief* dan *Indians*. Dalam hal ini juga ditambahkan kelompok kepentingan dalam komponen ketiga yaitu *Chief* dan *Indians*, mengingat perbedaan politik Jepang dengan Amerika Serikat yang dijadikan studi kasus dalam tulisan Graham T. Alisson.

#### **3.2.1 Aksi dan Niatan**

Aksi atau tindakan tidak selalu didahului dengan niatan (*intended goals*), melainkan merupakan gabungan dari beberapa niatan pemain-pemain yang kemudian menghasilkan *outcome* (Allison, 1969).

Dalam keputusan Jepang untuk bertahan dalam CPTPP maka juga bukan merupakan niatan yang dibuat oleh satu pihak saja. Melainkan terdiri dari banyak perspektif dari pemain-pemain atau pengambil kebijakan yang terlibat. Dalam hal ini terdapat dua niatan pemain yang terlibat, *Pertama*, dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa *Chiefs*, *Staff* dan *Indians* memiliki satu garis koordinasi. Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem politik Jepang yang bersifat sentralistik. Disamping itu keterlibatan aktif Shinzo Abe (*Chief*) secara pribadi dari awal perundingan hingga paska keluarnya Amerika Serikat dari TPP membuat suara-suara dari *Staff* dan *Indians* tidak terdengar dan hanya mengikuti arahan dari *Chiefs* Perdana Menteri. Dengan posisi demikian maka ketiganya memiliki niat tunggal. Niat pemain-pemain ini adalah didasarkan pada prioritas persepsi isu, kepentingan pertarungan dan kekuatan serta masalah-masalah. Dimana dari ketiga hal tersebut muncul sebuah isu bersama yaitu memperbaiki perekonomian, keinginan untuk memperkuat aliansi kawasan serta efek elektoral pada pemilihan selanjutnya.

Dalam hal ini juga perlu diketahui bahwa sistem politik Jepang bersifat sentralistik yang terlalu condong pada suatu kepemimpinan. Sehingga tidak terdapat dialektika yang beragam sebagai pendorong terciptanya kebijakan. Figur Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap ini. Hal ini didasari pada pertimbangan ekonomi domestik dan juga pertimbangan strategis kawasan untuk mengimbangi Tiongkok di kawasan.

*Kedua*, Disamping itu, keputusan Jepang untuk tetap bertahan dalam negosiasi CPTPP merupakan juga hasil kemauan dari kelompok bisnis yaitu Keidanren. Diketahui sebelumnya bahwa pelaku bisnis seperti Keidanren yang

merupakan donor bagi Partai Liberal Demokratik (LDP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sementara itu ketua Keindanren dari awal bergabungnya Jepang dalam TPP sampai paska keluarnya Amerika Serikat dari TPP masih menunjukkan pandangan yang positif. Menilai bahwa perjanjian perdagangan bebas tersebut akan memberikan keuntungan bagi perekonomian Jepang, utamanya sektor ekspor industri dan teknologi. Dengan adanya pengaruh ini maka *outcome* yang dihasilkan menghasilkan sikap Jepang yang bertahan dalam CPTPP.

Dari dua penjelasan diatas, dapat ditarik garis besar bahwa niatan Jepang untuk mempertahankan negosiasi TPP paska keluarnya Amerika Serikat tidak dihasilkan melalui niatan satu tunggal pemain. Namun hal tersebut juga dihasilkan dari dialektika dari dua pemain besar, yaitu *Pertama, Chieffs, Staffs, Indians* dan *kedua, kelompok kepentingan Keindanren*. Pihak pertama menyetujui adanya keberlangsungan negosiasi TPP karena keinginan untuk memperkuat posisi strategis keamanan Jepang di kawasan dan perbaikan ekonomi Jepang. Sementara pihak kedua menyetujui adanya keberlanjutan negosiasi karena dengan bergabungnya Jepang dalam TPP maka akan menguntungkan bisnis yang mereka jalankan. Dengan demikian niatan Jepang dalam mempertahankan negosiasi TPP dihasilkan oleh gabungan dari dua niatan tersebut.

### **3.2.2 Posisi (*where you stand depend on where you sit*)**

Posisi pemain menentukan niatan dan sikap yang diambil. Sehingga sikap yang diambil dari pemain-pemain merupakan refleksi dari posisi yang sedang dia jabat. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa sikap dari pemain yang berkontribusi

besar dalam penentuan Jepang bertahan dalam CPTPP adalah Perdana Menteri Shinzo Abe.

Pertama, posisi luar negeri (Sebagai Perdana Menteri). Sikap Perdana Menteri Shinzo Abe yang tetap memutuskan untuk bertahan dalam CPTPP meskipun sebelumnya mengeluarkan pernyataan bahwa TPP tanpa keterlibatan Amerika Serikat membuat perjanjian tersebut tidak berguna (Suastha, 2016). Dengan sikap yang demikian, Perdana Menteri Shinzo Abe berusaha secara maksimal dalam melakukan lobi agar Amerika Serikat tidak keluar dari TPP. Meskipun usaha Perdana Menteri Shinzo Abe sia-sia karena pada akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk keluar TPP.

Kebijakan Jepang dibawah Shinzo Abe untuk mempertahankan negosiasi TPP bukan tanpa resiko. Terdapat hal yang dipertaruhkan, yaitu kemungkinan besar mendapat serangan, kritik bahkan mosi tidak percaya dari pihak oposisi. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh oposisi dari partai Demokrat (DP) dalam mengusung mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertanian Jepang atas komentarnya yang terkait TPP. Disamping itu juga Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri menghadapi tentangan keras dari kalangan petani termasuk *Nokyo* yang mana merupakan segmen signifikan dari pemilih di Jepang. Kehilangan suara petani di Jepang memberikan dampak elektoral yang signifikan bagi partai Liberal Demokratik (LDP) mengingat “*approval rating*” bagi Shinzo Abe hanya berkisar 34.8%. Sehingga memaksa partai Liberal Demokratik (LDP) dibawah Shinzo Abe untuk melakukan kompromi terhadap semua segmen pemilih. Meskipun demikian, resiko-resiko tersebut dapat ditanggapi dengan kekuatan yang dimiliki oleh Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri dan pemimpin partai Liberal

Demokratik (LDP). Hal ini disebabkan karena Shinzo Abe dan partai koalisinya menduduki suara mayoritas dalam parlemen. Sehingga upaya legal yang dilakukan oleh koalisi oposisi tidak akan berpengaruh signifikan. Sementara itu dengan posisi yang kuat, maka membuat Shinzo Abe dengan mudah melakukan kompromi dengan kelompok petani dan asosiasnnya “*Nokyo*”. Disamping itu Jepang dibawah Shinzo Abe juga memiliki kekuatan lain yaitu sebagai negara dengan ekonomi terbesar pertama dalam TPP paska keluarnya Amerika Serikat. Hal ini membuat posisi tawar Jepang meningkat dalam perjanjian dagang tersebut. Dengan demikian maka Jepang memiliki pengaruh yang besar.

Disamping itu sikap Perdana Menteri Shinzo Abe yang demikian dipengaruhi oleh posisi yang dijabat, yaitu sebagai Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe harus mampu membuat kebijakan strategis yang mampu memaksimalkan kepentingan nasional dan kawasan Jepang. Dalam hal ini Shinzo Abe tahu bahwa Tiongkok tengah melakukan ekspansi pengaruh secara besar-besaran di kawasan Asia-Pasifik. Sehingga mempertahankan CPTPP merupakan kebijakan yang dianggap tepat, karena juga merupakan perjanjian dagang terbesar di dunia.

Posisi sebagai Perdana Menteri juga memberikan Shinzo Abe kesempatan untuk melakukan konsultasi bersama pemain-pemain lain. Dalam hal ini disebut sebagai saluran tindakan. Dalam saluran Tindakan menunjukkan bahwa terdapat konsultasi antara *Chieffs, Staffs, Indians* dan Kelompok kepentingan. Seperti Shinzo Abe yang menerima proposal dari organisasi ekonomi Jepang. Dari konsultasi juga kemudian dipertimbangkan mengenai kepentingan dan prioritas yang harus diutamakan. Dari hal tersebut kemudian

muncul bahwa meningkatnya pengaruh Tiongkok serta perbaikan ekonomi Jepang merupakan prioritas dan kepentingan utama dibanding mendahulukan kelompok yang menentang seperti asosiasi pertanian Jepang “*Nokyo*”. Hal ini kemudian disebut sebagai *Tindakan sebagai politik*, atau pertimbangan politik.

Kedua, posisi dalam negeri (Sebagai Presiden LDP) sikap Shinzo Abe juga dipengaruhi dari posisinya sebagai pemimpin Partai Liberal Demokratik (LDP) Jepang. Dimana salah satu pendorongnya yaitu Keindanren dan sejumlah pelaku bisnis Jepang menginginkan tetap bertahan dalam CPTPP. Suara dari Keindanren tentu sangat diperhatikan oleh Shinzo Abe sebagai seorang presiden Partai LDP. Hal ini didasarkan pada hubungan politik antara kedua entitas. Seperti diketahui dalam pembahasan sebelumnya bahwa Keindanren merupakan salah satu donor terbesar bagi partai Liberal Demokratik (LDP), dimana telah menjadi donor tetap selama 38 tahun sampai akhirnya berhenti pada tahun 1994. Meskipun demikian ketika partai Liberal Demokratik berkuasa kembali, maka Keindanren kembali menjadi donor tetap dengan angka sumbangan yang besar. Sementara itu posisi Keindanren yang juga penting dalam mendorong kebijakan tentu menginginkan keuntungan bisnis. Sehingga pada akhirnya mendorong pemerintah Jepang untuk tetap bertahan dalam CPTPP. Dengan kekuatan ini maka tentu suara, prioritas dan kepentingan Keindanren diperhatikan oleh Shinzo Abe sebagai presiden partai LDP.

Dengan adanya hubungan patron yang erat diantara Keindanren dan partai LDP maka membuat posisi Keindanren sangat kuat. Sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Mengabaikan suara Keindanren tentu akan berdampak pada donor yang di dapatkan oleh partai LDP. Disamping itu

tidak ada alasan untuk tidak mengakomodasi suara Keindanren, hal ini karena tidak adanya perbedaan posisi, justru adanya persamaan kepentingan, prioritas antara Keindanren dan *Chieffs, Staffs* dan *Indians* yang bekerja dalam struktur eksekutif Shinzo Abe, telah membuat lancarnya lobi yang terjadi. Sekali lagi, mengabaikan Keindanren akan mempengaruhi pendapatan partai, berkurangnya pendapatan sedikit besarnya akan berdampak pada performa partai dalam memenangkan pemilihan umum pada periode berikutnya.

### **3.2.3 Chief, Indians serta Kelompok Kepentingan**

Dalam hal ini terdapat hubungan vertikal antara *Chief* dan *Indians* dalam menentukan sebuah kebijakan. Hal ini disebabkan *Chief* yaitu Perdana Menteri atau kepala pemerintahan lain kerap sibuk dengan jadwal yang padat. Sehingga *Indians* seperti duta perwakilan negara mewakili kepentingan *Chief*. Dengan demikian yang lebih banyak memikirkan mengenai sebuah keputusan adalah *Indians* atau duta perwakilan atau diplomat bukan *Chief* (Allison, 1969).

Dalam penelitian ini terdapat empat jenis pemain yang terlibat yaitu *Chieffs* (lihat tabel 3.1) adalah *Shinzo Abe, Taro Aso, Taro Kono, Hiroshegi Shiko, Yoshihide Yuga, Toshimitsu Motegi*. *Staffs* adalah *Yamagami Shingo, Okochi Akhihiro, Katahira Satoshi, Nanazawa Jun* (lihat tabel 3.2). *Indians* adalah *Takehiro Kagawa, Kazuyoshi Umemoto* (lihat tabel 3.3). *Kelompok Kepentingan* adalah *Keindanren, Nokyo* dan asosiasi lain (lihat tabel 3.4). Meskipun demikian, pada kasus keputusan Jepang dalam bertahan pada *Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), maka yang berpengaruh besar adalah bukan merupakan *Indians* melainkan *Chief* sendiri



yaitu Perdana Menteri Shinzo Abe. Hal ini dilandasi dari partisipasi personal Shinzo Abe dalam mempertahankan negosiasi ini. Diantara beberapa diplomasi yang dilakukan secara personal oleh Perdana Menteri Shinzo Abe adalah dengan mengunjungi calon presiden terpilih Donald Trump pada 2016 di Trump Tower, Amerika Serikat. Abe berupaya untuk membujuk Donald Trump agar mengurungkan niatnya untuk memimpin Amerika Serikat keluar dari TPP. Ketika Trump telah menjabat sebagai Presiden dan Amerika telah keluar dari TPP, Perdana Menteri Shinzo Abe juga tetap mencoba hal serupa. Diplomasi tingkat tinggi yang melibatkan Perdana Menteri sebagai *diplomat* menandakan pentingnya perjanjian ini bagi Jepang dan Shinzo Abe. Keputusan ini penting bagi Perdana Menteri Shinzo Abe mengingat hal tersebut sangat penting bagi kondisi ekonomi dan kebijakan strategis Jepang dan bagi Partai LDP. Dengan demikian maka pemain yang berpengaruh besar adalah Perdana Menteri Shinzo Abe. Sehingga tidak terdapat pengaruh yang besar dari *Staffs* maupun *Indians* dalam penentuan keputusan ini. Hal ini mengindikasikan juga tidak adanya dinamika dalam pengambilan keputusan, karena dominasi dari *Chieff* yaitu Perdana Menteri Shinzo Abe.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP-12) telah di diskusikan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Terdapat dua belas negara yang terlibat dalam negosiasi termasuk Jepang dan Amerika Serikat. Meskipun pada akhirnya dokumen final TPP telah tercapai, namun dinamika politik dalam negeri Amerika Serikat merubah kondisi. Presiden terpilih Donald Trump berusaha untuk menepati janji kampanye dengan menarik Amerika Serikat dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Donald Trump menilai bahwa perjanjian tersebut hanya memberikan kerugian bagi Amerika Serikat. Dengan demikian maka Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari pakta aliansi ekonomi tersebut pada Januari 2017.

Keputusan keluarnya Amerika Serikat dari TPP tentu memberikan kejutan bagi mitra dagang dalam TPP. Kepergian Amerika Serikat membuat terjadinya kekosongan kepemimpinan dalam organisasi, serta kehilangan mitra dagang paling utama dalam pakta ekonomi ini. Sebagai konsekuensi dari tindakan Amerika Serikat ini, Jepang sebagai negara dengan *Gross Domestic Product* (GDP) terbesar kedua di TPP berperan lebih aktif dalam mempertahankan jalannya negosiasi. Jepang juga memimpin jalannya negosiasi dan membawa transisi dari TPP menuju CPTPP.

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan ketika Jepang memutuskan untuk tetap bertahan dalam negosiasi CPTPP atau TPP-11. Tidak hanya mempertahankan negosiasi yang berlangsung paska keluarnya Amerika Serikat dari pakta ekonomi, melainkan secara aktif mendorong adanya negosiasi lanjutan dalam CPTPP. Dalam menjelaskan ini maka terdapat tiga komponen dalam *Bureaucratic Model* yang dijelaskan oleh Graham T. Allison yaitu, *Pertama, aksi dan niatan*, dalam hal ini aksi Jepang dalam mempertahankan negosiasi *Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) tidak ditentukan oleh niatan tunggal satu entitas, melainkan hasil dari perundingan beberapa niatan pemain-pemain yang terlibat. Dalam hal ini terdapat empat pemain yang terlibat yaitu *Chieff, Staffers, Indians* dan *Kelompok Kepentingan*. Dalam hal ini terdapat dua niatan pemain yang terlibat, yaitu Perdana Menteri Shinzo Abe yang menginginkan perbaikan ekonomi dan kebijakan *counter-balancing* Tiongkok di kawasan. Selain itu juga desakan dari kelompok kepentingan seperti Keidanren yang menginginkan kesempatan bisnis yang lebih luas.

*Kedua, posisi*, dalam hal ini niatan dan tindakan didorong oleh posisi yang dijabat atau diduduki oleh pemain. Dalam hal ini Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang dan pemimpin partai Liberal Demokratik (LDP) bertindak melindungi kepentingan strategis Jepang dalam menyikapi manuver Tiongkok di Asia Pasifik. Serta sebagai pemimpin Partai Liberal yang mendengarkan dorongan dari pendonor. Disamping itu juga terdapat kelompok kepentingan yang mendorong adanya mempertahankan negosiasi CPTPP karena pada hakikatnya itu posisi mereka sebagai kelompok bisnis.

*Ketiga, Chief, Indians serta kelompok kepentingan*, dalam hal ini terdapat hubungan vertikal antara *Chief* beserta *Indians*, dimana *Indians* banyak memutuskan sesuatu karena kesibukan dari *Chief* yaitu Perdana Menteri Jepang. Namun dalam kasus ini, *Chief* merupakan penentu kebijakan utama, bahkan Shinzo Abe bergerak secara personal untuk mengupayakan keberlangsungan dari CPTPP. Sehingga *Indians* hanya bertugas untuk mengikuti instruksi holistik dari Perdana Menteri Shinzo Abe.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Jepang memiliki urgensi dalam mempertahankan posisinya sebagai anggota dalam negosiasi TPP. Hal ini telah dimulai sejak awal, yaitu a.) Pada *aksi* dan *niatan*, dimana niatan utama yaitu adanya niatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Jepang serta sebagai kebijakan strategis kawasan dalam menghadapi pengaruh Tiongkok yang semakin meluas. b.) Posisi Shinzo Abe. Terdapat dua niatan yang dipengaruhi oleh posisi pemain yaitu *pertama domestik*, sebagai presiden partai LDP yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi sebagai bagian dari strategi elektoral pada pemilihan mendatang. Sebagai presiden partai LDP, Shinzo Abe ingin menarik pemilih yaitu dengan memperbaiki kondisi ekonomi. *Kedua internasional*, sebagai Perdana Menteri Jepang, dimana sebagai perdana menteri Shinzo Abe berupaya untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik. c.) Pengambilan keputusan diambil dan diarahkan langsung oleh *Chief* yaitu Shinzo. Dengan demikian tidak terdapat pengaruh yang besar dari *Indians*. Adanya hal ini mengkonfirmasi bahwa aksi dan tindakan Shinzo Abe mendominasi pembuatan kebijakan. Disamping itu terdapat kelompok kepentingan seperti Keidanren yang mendorong adanya keberlanjutan posisi Jepang di TPP, sementara Nokyō yang

justro menolak. Namun pada akhirnya pengambilan kebijakan, secara luas dipengaruhi Shinzo Abe.

#### **4.2 Saran dan Rekomendasi**

Penelitian ini membahas mengenai latar belakang yang mendorong Jepang tetap mempertahankan negosiasi CPTPP pasca keluarnya Amerika Serikat dari pakta perjanjian ekonomi tersebut. Dengan demikian, maka penelitian ini hanya membahas mengenai proses terjadinya pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Jepang. Sementara itu masih terdapat banyak negara yang tetap bertahan pasca keluarnya Amerika Serikat dari TPP. Oleh karena masih perlu adanya penelitian lanjutan dari sudut pandang negara-negara anggota TPP lain yang bertahan pasca keluarnya Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan untuk memahami secara holistik permasalahan yang terjadi. Dengan landasan ini, penulis menyarankan kepada peneliti dalam penelitian selanjutnya untuk membahas mengenai sikap negara-negara lain yang tetap bertahan dalam TPP meski Amerika Serikat memilih untuk keluar dari perjanjian perdagangan bebas ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agrinews. (2018, Maret). Retrieved from <http://english.agrinews.co.jp/?p=8139>
- Allison, G. T. (1969). Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. *The American Political Science Review*, Volume 63, Issue 3 (Sep., 1969), 689-718.
- Allison, G. T., 1969. *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis (JSTOR: The American Political Science Review)*. California: Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis (JSTOR: The American Political Science Review), pp. 693-694.
- Andri, Y. (2017, Januari). Retrieved from <https://kalimantan.bisnis.com/read/20170804/434/677858/kebijakan-jepang-peningkatan-ekonomi-jadi-prioritas>
- Asahi Shimbun. (2018). Retrieved from <http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201812280029.html>
- BBC, (2017, Oktober). *TPP: What is it and why does it matter?*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/business-32498715>
- Cerdeiro, D. A. (2016). Estimating the Effects of the Trans-Pacific Partnership (TPP) on Latin America and the Caribbean (LAC). *IMF Report*, 30.
- Charlotte Greenfield, C. P. (2018, Februari 21). *Final version of Trans-Pacific trade deal released, rules pushed by U.S. on ice*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp/final-version-of-trans-pacific-trade-deal-released-rules-pushed-by-u-s-on-ice-idUSKCN1G50AP>
- Cicilia, S., (2018, Oktober). *TPP berganti menjadi CPTPP, siapa paling diuntungkan dari perjanjian dagang tanpa AS?*. Retrieved from HYPERLINK "<https://internasional.kontan.co.id/news/tpp-berganti-menjadi-cptpp-siapa-paling-diuntungkan-dari-perjanjian-dagang-tanpa-as>" <https://internasional.kontan.co.id/news/tpp-berganti-menjadi-cptpp-siapa-paling-diuntungkan-dari-perjanjian-dagang-tanpa-as> .
- Cimino-Isaacs, C. (2016). *Trans-Pacific Partnership: An Assessment*. Washington: Peterson Institute for International Economics.
- CNBC. (2017, Mei 16). Retrieved from Japan must take the lead in TPP after US withdrawal: Japan PM: <https://www.cnbc.com/video/2017/05/16/japan-must-take-the-lead-in-tpp-after-us-withdrawal-japan-pm-abe.html>

- CNN Indonesia. (2017, Januari 24). *Trump Bawa AS Resmi Keluar dari TPP*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170124011942-134-188433/trump-bawa-as-resmi-keluar-dari-tpp>
- Congresional Research Service. (2013). *The Trans-Pacific Partnership Negotiations and Issues for Congress*. CRS Report for U.S Congress.
- Davis, C. L. (2017). *Japan: Interest Group Politics, Foreign Policy Linkages, Contested Megaregulation: Global Economic Ordering After TPP*.
- Davis, C. L. (2018). *Japan: Interest Group Politics, Foreign Policy Linkages, and the TPP*. Harvard: Harvard University.
- Euro2Day. (2013). Retrieved from [https://www.euro2day.gr/ftcom\\_en/article-ft-en/1116859/japanese-pm-abe-vows-to-protect-agriculture-in-tra.html](https://www.euro2day.gr/ftcom_en/article-ft-en/1116859/japanese-pm-abe-vows-to-protect-agriculture-in-tra.html)
- George, A. (2017). Retrieved from <https://thediplomat.com/2017/11/japans-rush-to-conclude-tpp-11/>
- Granville, K. (2017, Januari 23). *What Is TPP? Behind the Trade Deal That Died*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/interactive/2016/business/tpp-explained-what-is-trans-pacific-partnership.html>
- Idrys, A., 2017. *Japan: TPP expected to remain a priority despite EU trade agreement*. Retrieved from <https://asiancorrespondent.com/2017/07/japan-tpp-expected-remain-priority-despite-eu-trade-agreement-analyst/> \1  
<https://asiancorrespondent.com/2017/07/japan-tpp-expected-remain-priority-despite-eu-trade-agreement-analyst/#Dj0ZzysKwUKTE6vL.97>
- Harner, S. (2011). Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/stephenharner/2011/09/19/reforming-japans-socialized-agriculture/>
- Japan Times. (2017). Retrieved from Dengan demikian pemain-pemain diharuskan mengambil keputusan yang cepat.
- Japan Times. (2018). Retrieved from <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/07/06/business/japan-completes-domestic-procedures-ratify-11-member-tpp/#.XTkFZugzbiU>
- Kantei.go.id. (2017). Retrieved from [https://japan.kantei.go.jp/97\\_abe/actions/201710/23article1.html](https://japan.kantei.go.jp/97_abe/actions/201710/23article1.html)

- Kantei.go.id. (2017, Januari 20). *Policy Speech by Prime Minister Shinzo Abe to the 193rd Session of the Diet*. Retrieved from [https://japan.kantei.go.jp/97\\_abe/statement/201701/1221105\\_11567.html](https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201701/1221105_11567.html)
- Kantei.go.id. (2018, Oktober). Retrieved from [https://japan.kantei.go.jp/98\\_abe/meibo/daijin/index\\_e.html](https://japan.kantei.go.jp/98_abe/meibo/daijin/index_e.html)
- Kantei.go.id. (2018). Retrieved from [https://japan.kantei.go.jp/98\\_abe/actions/201812/\\_00056.html](https://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/201812/_00056.html)
- Keidanren. (n.d.). Retrieved from <https://www.keidanren.or.jp/en/profile/pro001.html>
- Keidanren. (2017, November). Retrieved from <https://www.keidanren.or.jp/en/speech/kaiken/2017/1108.html?v=s>
- Keidanren. (2017). Retrieved from <https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2016/039.html>
- Kaori Kaneko, Takashi Umekawa, (2018). *Trans-Pacific trade pact, without U.S., to be signed in March: Japan*. Retrieved from HYPERLINK "<https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp-japan/trans-pacific-trade-pact-without-u-s-to-be-signed-in-march-japan-idUSKBN1FC0X3>" <https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp-japan/trans-pacific-trade-pact-without-u-s-to-be-signed-in-march-japan-idUSKBN1FC0X3>
- Kobayashi. (1988). *Centralization in Japan and the Significance of the Interchange Activities in the North Pacific*.
- Korves, R. (2014). *Dampak Dari Tpp Pada Sektor Agri-Makanan Jepang*. Retrieved from <https://globalfarmernetwork.org/id/2014/12/impact-of-the-tpp-on-the-japanese-agri-food-sector/>
- Kwoon, J. Y. (2018, Oktober 21). *Cost-benefit analysis of Japan's decision to join CPTPP*. Retrieved from <https://www.asiatimes.com/2018/10/opinion/cost-benefit-analysis-of-japans-decision-to-join-cptpp/>
- McBride, J., (2018). *What Is the Trans-Pacific Partnership (TPP)?*. Retrieved from HYPERLINK "<https://www.cfr.org/backgrounder/what-trans-pacific-partnership-tpp>" <https://www.cfr.org/backgrounder/what-trans-pacific-partnership-tpp>
- McClellan, S. S. (2016). Retrieved from <http://cc.pacforum.org/2017/01/us-japan-relations-trump-effect/>



- Meltzer, J. P., (2013). *Japan to Join the Trans-Pacific Partnership – Finally!*. Retrieved from HYPERLINK "<https://www.brookings.edu/blog/up-front/2013/03/18/japan-to-join-the-trans-pacific-partnership-finally/>" <https://www.brookings.edu/blog/up-front/2013/03/18/japan-to-join-the-trans-pacific-partnership-finally/>
- Miller, T. F. (2018, Desember 06). *Japan Pushes on With TPP-11 With U.S., China at Odds*. Retrieved from <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-06/japan-pushes-on-with-tpp-11-as-u-s-and-china-remain-at-odds>
- Mireya Solis and Shujiro Urata, 2017. *Asian Economic Policy Review*. Abenomics and Japan's Trade Policy, 19 Juli, pp. 106-123.
- Miyazaki, A. (2018). Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp-japan/japan-hopes-u-s-returns-to-tpp-but-overhaul-tough-negotiator-idUSKCN1G40ES>
- Mofa Japan. (2019, April). Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/about/hq/list2.html>
- Mofa New Zealand. (n.d.). *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement*.
- Motoko, R. (2017). *TPP, the Trade Deal Trump Killed, Is Back in Talks Without U.S.* Retrieved from <https://www.nytimes.com/2017/07/14/business/trans-pacific-partnership-trade-japan-china-globalization.html>
- Mulgan, A. G. (2016). *Securitizing the TPP in Japan: Policymaking Structure and Discourse*.
- Nakamura, A. (2003). *Nippon Keidanren to back political donations*. Retrieved from <https://www.japantimes.co.jp/news/2003/05/13/business/nippon-keidanren-to-back-political-donations/#.XSjXeOgzblU>
- Nam, H. M., 2017. *Japanese Agriculture and TPP Negotiations under the Abe Administration: A Two-Level Game Analysis*. Seoul: Seoul National University Graduate School.
- Nikkei. (2018, April 18). *Japan races to ratify TPP ahead of pressure from Trump*. Retrieved from <https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/Japan-races-to-ratify-TPP-ahead-of-pressure-from-Trump>.
- Nirmala, R., (2017). *Jepang: TPP tak berarti tanpa 250 juta konsumen AS*. Retrieved from HYPERLINK "<https://beritagar.id/artikel/berita/strategi-negara-anggota-tpp-tanpa-as>" <https://beritagar.id/artikel/berita/strategi-negara-anggota-tpp-tanpa-as>

negara-anggota-tpp-tanpa-as

- Pratomo, E., 2016. *Hukum Perjanjian International*. 1 ed. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- SAN Feng, ZHANG Xiao-lan, 2014. Could Abenomics Save the Economy of Japan?. *Northeast Asian Forum*, 14 Januari.
- SICE. (2019). *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership Agreement (CPTPP) - Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, and Vietnam*. Retrieved from [http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/TPP\\_e.ASP](http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/TPP_e.ASP)
- Suastha, R. D. (2016, November 22). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161122091229-113-174304/pm-jepang-tpp-tidak-akan-berguna-tanpa-as>
- Takashi, T. (2018, Februari 19). *How and Why Japan Has Saved the TPP: From Trump Tower to Davos*. Retrieved from <http://www.theasanforum.org/how-and-why-japan-has-saved-the-tpp-from-trump-tower-to-davos/>.
- Tanabe, M., (2012). *Are Japan's auto regs nontariff barriers?*. Retrieved from HYPERLINK "http://www.autonews.com/article/20120914/OEM01/120919897/are-japans-auto-regs-nontariff-barriers" [http://www.autonews.com/article/20120914/OEM01/120919897/are-japans-auto-regs-nontariff-barriers ?](http://www.autonews.com/article/20120914/OEM01/120919897/are-japans-auto-regs-nontariff-barriers)
- Tasker, P. (2018). *Why investors should cheer Shinzo Abe's party victory*. Retrieved from <https://www.ft.com/content/c02907ea-bbdd-11e8-94b2-17176fbf93f5>
- Timeline of the CPTPP*. (2018, Desember 17). Retrieved from [https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/timeline\\_negotiations-chronologie\\_negociations.aspx?lang=eng](https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/timeline_negotiations-chronologie_negociations.aspx?lang=eng)
- Ustr.gov. (2015, April 10). *Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement*. Retrieved from <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership>
- VOA Indonesia. (2017, Januari 24). *Presiden Trump Tarik Amerika Serikat dari Kemitraan TPP*. Retrieved from

<https://www.voaindonesia.com/a/presiden-trump-tarik-as-dari-kemitraan-tpp/3689606.html>.

Vargö, L., (2018). *Abe's Strategy in the Trump Era: Uncertainty in US Policy Toward Japan*. Retrieved from Hyperlink "<http://isdpa.eu/abe-strategy-trump-era/>" <http://isdpa.eu/abe-strategy-trump-era/> .

Weiner, T. (1994, Oktober 4). *C.I.A. Spent Millions to Support Japanese Right in 50's and 60's*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/1994/10/09/world/cia-spent-millions-to-support-japanese-right-in-50-s-and-60-s.html>

White House. (2017, Januari 23). *Presidential Memorandum Regarding Withdrawal of the United States from the Trans-Pacific Partnership Negotiations and Agreement*. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-regarding-withdrawal-united-states-trans-pacific-partnership-negotiations-agreement/>

William Cooper, Mark Manyin, 2013. *Japan Joins the Trans-Pacific Partnership : What Are the Implications?*. Congressional Research Service, p. 16.

